

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR 2014

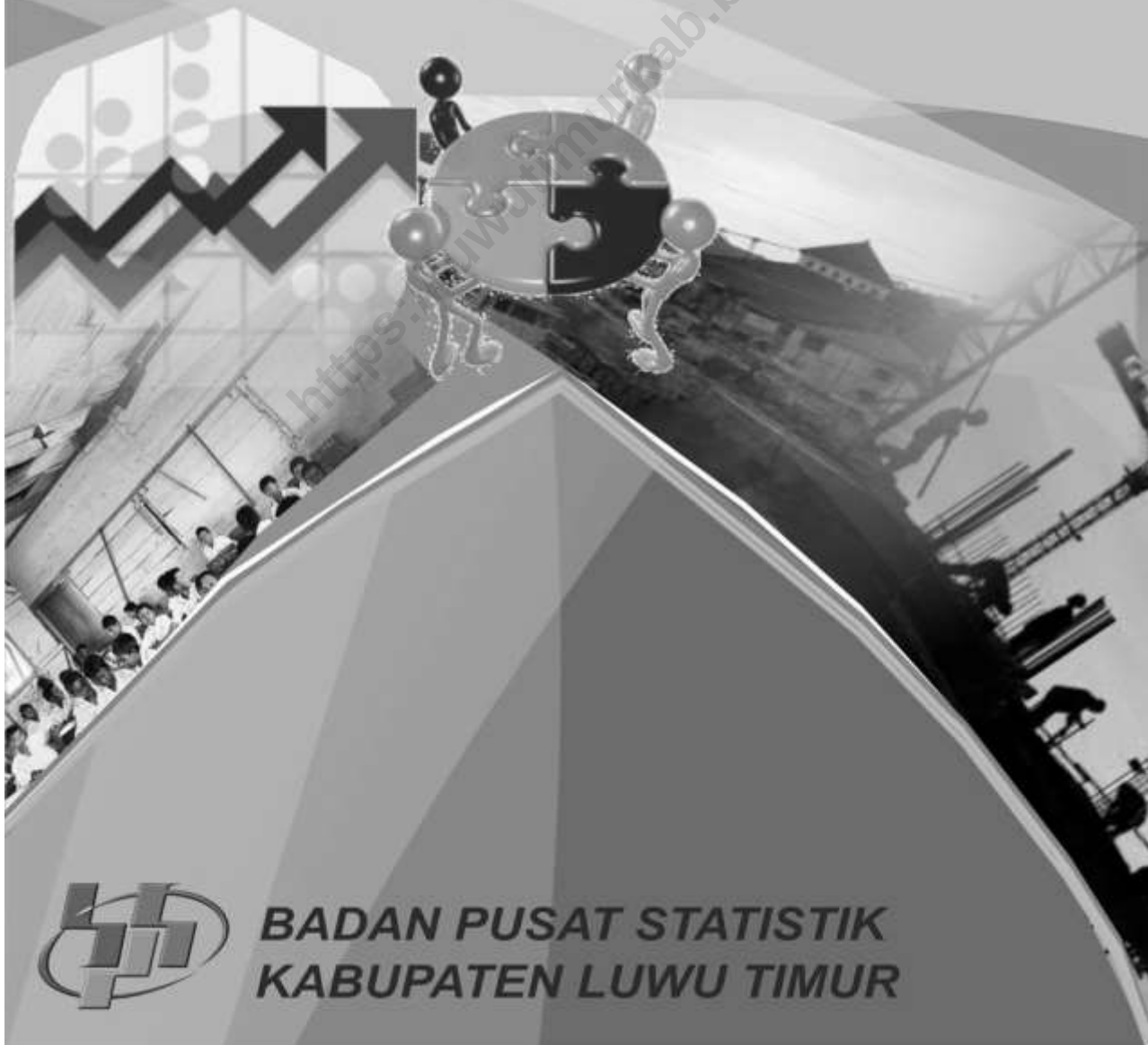


<https://luwutimurkab.bps.go.id>



***BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LUWU TIMUR***

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR 2014



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LUWU TIMUR**

ANALISIS
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2014



***BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LUWU TIMUR***

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014

Katalog BPS : 4102.002.7325
Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm
Jumlah Halaman : vi + 78
Pembina : Guruhwahyu Martopo, S.Si, M.Si
Pengarah : Mufida Rahmalaila, S.ST

Penyusun : Tania Dani Tajianti, S.ST
Gambar Kulit : Tania Dani Tajianti, S.ST
Layout : Tania Dani Tajianti, S.ST

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LUWU TIMUR**
Jl. Soekarno Hatta, Malili 92981
Telp. 0474321647
e-mail: bps7325@bps.go.id
homepage: <http://luwutimurkab.bps.go.id>



KATA PENGANTAR

Kami memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada kita sehingga publikasi yang berjudul “Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014” dapat diselesaikan dengan baik.

Hakikat pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Peran para pelaku pembangunan kemudian adalah bagaimana menterjemahkan hakikat tersebut dan menjabarkannya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Tentu saja, instrumen untuk mengukur sejauh mana pembangunan manusia itu telah berjalan juga menjadi faktor penting didalamnya.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur berupaya untuk menyusun Analisis Indeks Pembangunan Manusia sebagai sumber informasi penting yang dapat digunakan dalam penyusunan perencanaan terkait pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur secara berkesinambungan. Selain itu, dengan adanya publikasi ini diharapkan Pemerintah maupun masyarakat luas dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pembangunan yang telah dilakukan, sekaligus dapat mengidentifikasi kebutuhan daerah bagi pembangunan di masa yang akan datang.

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah turut serta membantu penyusunan publikasi ini. Akhirnya kami berharap, kritik dan saran guna perbaikan publikasi dimasa mendatang. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengguna data.

Malili, November 2015

**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN LUWU TIMUR**

K e p a l a,

Guruhwahu Martopo, S.Si, M.Si
NIP. 19720311-199412 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR	vi
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan	3
1.3 Manfaat dan Kegunaan	3
1.4 Fungsi, Lingkup dan Keterbatasan	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
 BAB II. METODOLOGI PENGHITUNGAN	
2.1 Perkembangan Metodologi IPM	7
2.2 Sumber Data	7
2.3 Perubahan Metodologi IPM Tahun 2014.	7
2.4 Komponen IPM.	9
2.4.1 Angka Harapan Hidup saat lahir	9
2.4.2 Pengetahuan.	9
2.4.3 Hidup Layak.	10
2.5 Teknik Penghitungan IPM dengan Metode Baru.	12
2.5.1 Angka Harapan Hidup.	12
2.5.2 Harapan Lama Sekolah.	13
2.5.3 Rata-Rata Lama Sekolah.	14
2.5.4 Purchasing Power Parity (PPP)	16
2.6 Konsep dan Definisi Disparitas Pembangunan Manusia dan Kecepatan Perubahan IPM (Shortfall).	19
2.7 Klasifikasi/tingkatan status IPM.	21
2.8 Konsep/Istilah dan Definisi.	21

BAB III. GAMBARAN UMUM SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT

3.1	Kondisi Geografis	23
3.2	Kependudukan	23
3.3	Kesehatan.	26
3.3.1	Angka Harapan Hidup dan Penolong Persalinan 26.	
3.3.2	Pemberian Imunisasi.	30
3.4	Pendidikan	31
3.4.1	Sarana dan Prasarana Pendidikan	32.
3.4.2	Kemampuan Baca Tulis	34
3.4.3	Rata-Rata Lama Sekolah	36
3.4.4	Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan	37
3.4.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	38.
3.4.6	Angka Partisipasi Kasar (APK)	40.
3.4.7	Angka Partisipasi Murni (APM)	42.
3.5	Pertumbuhan Ekonomi.	43
3.5.1	PDRB Per Kapita.	43
3.5.2	PDRB Menurut Kategori/Lapangan Usaha.	44.

BAB IV. KEMAJUAN PENCAPAIAN PEMBANGUNAN MANUSIA

4.1	Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia. . .	48
4.2	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur (Perbandingan antar Wilayah di Propinsi Sulawesi Selatan)	54

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Dimensi, Indikator dan Indeks Pembentuk IPM	11
Tabel 2.2. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM yang digunakan dalam penghitungan	11
Tabel 2.3. Jenjang Pendidikan dan Skor yang Digunakan untuk Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS).	11
Tabel 2.4. Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai dasar Penghitungan Kemampuan Daya Beli (PPP)	13
Tabel 2.5. Konversi Lama Sekolah.	14
Tabel 2.6. Konversi Lama Sekolah berdasarkan Ijazah Terakhir untuk Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	15
Tabel 2.7. Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Kemampuan Daya Beli (PPP)	18
Tabel 3.1. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 dan 2014.	24
Tabel 3.2. Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan Terakhir di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2014	27
Tabel 3.3. Persentase Balita Menurut Lamanya Disusui (bulan) dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 dan 2014.	29
Tabel 3.4. Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan yang Lalu Menurut Jenis Kelamin dan Lama Hari Sakit, 2013-2014.	30
Tabel 3.5. Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Menurut Pemberian Imunisasi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 dan 2014.	31
Tabel 3.6. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013-2014 (Persen).	38
Tabel 3.7. PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2014**)	43
Tabel 3.8. Perbandingan PDRB Menurut Kategori/Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014**)	46

Daftar Tabel

Tabel 4.1. Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 - 2014.	49
Tabel 4.2. Angka Harapan Hidup Kab/Kota se-Luwu tahun 2010-2014.	50
Tabel 4.3. Harapan Lama Sekolah Kab/Kota se-Luwu Tahun 2010-2014	52
Tabel 4.4. Rata-rata Lama Sekolah Kab/Kota se-Luwu Tahun 2010-2014	52
Tabel 4.5. Kemampuan Daya Beli Kab/Kota se-Luwu Tahun 2010-2014 (Ribu Rupiah)	53
Tabel 4.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur Perbandingan antar Wilayah di Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014.	57

DAFTAR GRAFIK DAN GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Piramida Penduduk Kabupaten Luwu Timur, 2014.	25
Gambar 2. Alur Masalah Kesehatan.	22
Grafik 3.1. (AHH;e0) Kabupaten Luwu Timur, 2010-2014 (Tahun) .	28
Grafik 3.2. Persentase Penduduk Menurut Jenis Keluhan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014.	29
Grafik 3.3. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2014.	34
Grafik 3.4. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2014.	36
Grafik 3.5. Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2014.	36
Grafik 3.6. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2014 (Persen) . .	40
Grafik 3.7. Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012-2014.	41
Grafik 3.8. Angka Partisipasi Murni Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012-2014.	42
Grafik 3.9. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan, 2010-2014**) (persen)	44
Grafik 4.1. IPM Kabupaten/Kota sePropinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014.	54

B A B 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebelum tahun 1970-an, pembangunan semata-mata dipandang sebagai fenomena ekonomi saja (Todaro dan Smith). Pengalaman pada dekade tersebut menunjukkan adanya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tapi gagal memperbaiki taraf hidup sebagian besar penduduknya. Pada tahun 1991, Bank Dunia menerbitkan laporannya yang menegaskan bahwa “tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan” (*World Development Report*). Pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap masyarakat dan institusi nasional. Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki konsep pertumbuhan ekonomi karena selain memperhitungkan aspek pendapatan juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan.

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai suatu proses perluasan pilihan bagi penduduk. Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan, bukan hanya alat dari pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Keberhasilan pembangunan khususnya pembangunan manusia dapat dinilai secara parsial dengan melihat seberapa besar permasalahan yang paling mendasar di masyarakat tersebut dapat teratasi. Namun persoalannya adalah capaian pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek pembangunan tertentu berhasil dan aspek pembangunan yang lainnya gagal. Selanjutnya bagaimana menilai pembangunan manusia secara keseluruhan?

Persoalan mengenai capaian pembangunan manusia dewasa ini telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan. Berbagai ukuran pembangunan manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran standar yang dapat dibandingkan antar wilayah atau antar negara. Oleh karena itu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa

menetapkan suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Cakupan pembangunan manusia yang sangat luas dimaksud menjadikan Berbicara mengenai pilihan-pilihan manusia adalah sangat tidak terbatas jumlahnya dan bahkan cenderung berubah setiap waktu. Namun diantara sejumlah pilihan ini, ada 3 pilihan yang sangat esensial untuk dipenuhi yaitu; pilihan untuk hidup sehat dan berumur panjang; pilihan untuk memiliki ilmu pengetahuan, dan pilihan untuk mencapai akses ke berbagai sumber yang diperlukan agar dapat memenuhi standar kehidupan yang layak (*a decent standard of living*). Apabila ketiga pilihan mendasar tersebut dapat dipenuhi maka seseorang akan mudah meningkatkan kemampuannya dalam aktifitas sehari-hari serta memiliki kemampuan menangkap peluang yang ada untuk meningkatkan kehidupannya serta memiliki kemampuan pula untuk meraih pilihan-pilihan lain yang juga tidak kalah pentingnya seperti pilihan untuk berpartisipasi dalam bidang politik, kebebasan mengeluarkan pendapat dan sebagainya.

1.2. Maksud dan Tujuan Penulisan

Publikasi Analisis Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 disusun dalam kerangka untuk menempatkan dimensi manusia sebagai titik sentral dalam pembangunan, dengan bercirikan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga diharapkan daerah mempunyai indikator yang berfungsi sebagai ukuran pencapaian pembangunan, terutama yang terkait erat dengan upaya-upaya peningkatan kualitas hidup manusia. Selain itu publikasi ini untuk mengukur kualitas manusia serta memberikan gambaran umum kinerja pembangunan Kabupaten Luwu Timur selama periode 2010-2014. IPM juga menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.

1.3. Manfaat dan Kegunaan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro yang dapat mencerminkan kinerja pembangunan manusia, sehingga

dapat dilihat perkembangan kesejahteraan penduduk di wilayah dari tahun ke tahun dan keterbandingan dengan wilayah lainnya.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga merupakan salah satu ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah yang mempunyai dimensi yang sangat luas, karena menggambarkan kualitas penduduk berupa hidup sehat dan berumur panjang, intelektualitas berupa kemampuan memiliki ilmu pengetahuan dan standar hidup layak.

Secara umum manfaat data Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut :

- Ukuran kinerja daerah (evaluasi proses pembangunan SDM)
- Mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia
- Mengetahui perkembangan hasil pembangunan SDM dalam berbagai aspek kehidupan
- Mengetahui capaian program-program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat
- Mendapatkan “feedback” atas kurang-berhasilan pembangunan
- Sebagai variabel pendukung penyusunan DAU
- Mengukur keterkaitan dengan proses pembangunan di bidang lainnya (ekonomi, sosial, politik dan sebagainya)

1.4. Fungsi, Lingkup dan Keterbatasan.

Sejak diterbitkannya HDI oleh UNDP akan memudahkan para pembuat kebijakan untuk mengukur pembangunan manusia. Hal ini disebabkan antara lain karena kesederhanaan metode penghitungannya, bersifat global, tidak terlalu rinci, dan merupakan kombinasi komponen sosial dan ekonomi. Dalam era otonomi daerah, prioritas pembangunan perlu betul-betul diarahkan pada kelompok penduduk, daerah dan sektor yang paling kritis untuk mendapat perhatian. Oleh karena itu kehadiran Laporan Indeks Pembangunan Manusia menjadi lebih strategis bagi para pembuat kebijakan di daerah.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh upaya pemberdayaan yang telah dicapai masyarakat secara cepat adalah indikator komposit. Beberapa indikator komposit yang telah dikembangkan dan direkomendasi UNDP adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Jender (IPJ), Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ), dan Indeks Kemiskinan Manusia (IKM). Indikator tersebut

digunakan dalam perspektif yang berbeda, dan dalam penyajian laporan ini secara khusus hanya menyajikan IPM untuk mengukur indikator kualitas manusia.

IPM digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian upaya pembangunan manusia secara keseluruhan dan bersifat agregatif. Meskipun demikian ukuran komposit ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran bagi para perencana pembangunan di daerah tentang kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai selama ini. Secara umum, langkah yang ditempuh dalam menghadapi pengembangan tolok ukur fenomena yang sifatnya kuantitatif, selalu dimulai dengan memahami konsep dan definisi dan batasan baku masalah yang hendak diukur. Maka dalam laporan ini disajikan konsep dan definisi dari beberapa indikator yang digunakan serta sumber data yang dibutuhkan dalam penyusunan publikasi ini.

Untuk mengukur ketiga dimensi pembangunan yang disebutkan di atas dibentuk suatu ukuran berupa indeks komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan berdasar pada 3 indikator yaitu :

- a. Angka Harapan Hidup yang mengukur hidup sehat dan umur panjang,
- b. Pendidikan yang terdiri dari ; Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah, yang mengukur tingkat pengetahuan, dan
- c. *Purchasing Power Parity* (PPP) yang merupakan ukuran pendapatan yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli

1.5. Sistematika Penulisan

Indeks Kualitas Hidup Manusia Kabupaten Luwu Timur 2014 yang selanjutnya akan difokuskan pada penjelasan indeks komposit Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menyajikan 5 bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I - Pendahuluan

Menguraikan mengenai latar belakang; maksud dan tujuan; manfaat dan kegunaan; fungsi, lingkup dan keterbatasan; serta sistematika penulisan.

Bab II - Metodologi Penghitungan

Membahas tentang metodologi yang meliputi penjelasan IPM dan komponennya, metode penghitungan yang digunakan, kecepatan perubahan IPM (*Shortfall*), klasifikasi/tingkatan status IPM, sumber data yang digunakan dan beberapa konsep/istilah dan definisi.

Bab III - Gambaran Umum Sosial Ekonomi Masyarakat

Membahas mengenai gambaran umum Kabupaten Luwu Timur yang diuraikan atas kondisi geografis, kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.

Bab IV - Kemajuan Pencapaian Pembangunan Manusia

Membahas mengenai komponen-komponen Indeks Pembangunan Manusia diantaranya Indeks Kesehatan, Indeks Pendidikan, dan Paritas Daya Beli serta keterbandingan IPM Kabupaten Luwu Timur dengan kab se-Luwu dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Bab V Penutup Berisi kesimpulan dan saran implikasi kebijakan

B A B 2

METODOLOGI

2.1. Perkembangan Metodologi IPM

IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 dan komponen IPM yang digunakan seperti Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan PDB per kapita. Pada tahun 1991 terjadi penyempurnaan komponen IPM yang digunakan, yaitu AHH, AMH, RLS, dan PDB per kapita. Pada tahun 1995 terjadi penyempurnaan kembali terhadap komponen yang digunakan, yaitu AHH, AMH, kombinasi APK, dan PBD per kapita. Pada tahun 2010 UNDP melakukan perubahan terhadap metodologi yang digunakan yaitu AHH, RLS, HLS dan PNB per Kapita serta penghitungan agregasi indeks menggunakan rata-rata geometrik. Kemudian pada tahun 2011 dan 2014 penyempurnaan metodologi yaitu mengganti tahun dasar PNB dari 2005 menjadi 2011 serta merubah metode agregasi indeks pendidikan dari rata-rata geometrik menjadi rata-rata aritmatik.

2.2 . Sumber Data

Data yang digunakan untuk keperluan penyusunan IPM Kabupaten Luwu Timur sebagian besar menggunakan data primer, yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) semesteran tahun 2014 untuk mengumpulkan data kependudukan meliputi bidang pendidikan, kesehatan, perumahan, sosial budaya, konsumsi atau pengeluaran rumah tangga dan sosial ekonomi lainnya yang terdapat dalam kuesioner Kor dan Modul.

2.3. Perubahan Metodologi IPM Tahun 2014

Pada tahun 2014 terjadi perubahan indikator dan metode penghitungan IPM, yaitu:

1. Angka Melek huruf pada metode lama diganti dengan Harapan Lama Sekolah (HLS). Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.
2. Pada metode lama, terdapat 27 komoditas yang digunakan dalam menghitung Paritas Daya Beli. Pada metode baru, terpilih 96 komoditas dalam penghitungan paritas daya beli.
3. Metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM diantaranya:

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. **Angka Melek Huruf (AMH)** sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.
2. **Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita** tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
3. Penggunaan rumus **rata-rata aritmatik** dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dimensi lain.

Keunggulan IPM metode baru:

1. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan **Rata-rata Lama Sekolah** dan angka **Harapan Lama Sekolah**, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. **PNB** menggantikan **PDB** karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
2. Dengan menggunakan **rata-rata geometrik** dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Dampak perubahan IPM metode baru diantaranya:

1. Secara umum level IPM dengan metode baru lebih rendah dibanding dengan IPM metode lama.
2. Terjadi perubahan peringkat IPM. Peringkat tidak bisa diperbandingkan akibat adanya perbedaan indikator dan metodologi.

2.4 Komponen IPM

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi dasar yang antara lain mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dalam pengukuran umur panjang dan sehat digunakan indikator angka harapan hidup saat lahir; dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah; sedangkan dimensi hidup layak digunakan indikator rata-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

2.4.1. Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH)

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dengan menggunakan pendekatan tidak langsung. Ada 2 (dua) jenis data yang digunakan dalam penghitungan AHH, yaitu Angka Lahir Hidup (ALH) dan Angka Masih hidup (AMH). Paket program *Mortpack* digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya dipilih metode *Trussel* dengan model *West* yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

Penggunaan angka harapan hidup didasarkan atas pertimbangan bahwa angka ini merupakan *resultante* dari berbagai indikator kesehatan. AHH merupakan cerminan dari ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, sanitasi lingkungan, pengetahuan ibu tentang kesehatan, gaya hidup masyarakat, pemenuhan gizi ibu dan bayi, dan lain-lain. Oleh karena itu AHH untuk sementara bisa mewakili indikator lama hidup.

Penggunaan batas maksimum angka tertinggi yang digunakan untuk penghitungan indeks yaitu 85 tahun dan terendah 20 tahun. Angka tersebut diambil dari standar UNDP dan BPS.

2.4.2. Pengetahuan

Indikator yang digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS

didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tujuan penghitungan HLS adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal dengan asumsi dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

Dalam penghitungan indeks pendidikan, batasan nilai minimum dan maksimum juga digunakan sesuai standar UNDP dan BPS. Batas maksimum untuk HLS adalah 18 tahun sedangkan batas minimumnya adalah 0 tahun. Untuk rata-rata lama sekolah menggunakan batas maksimum 15 tahun dan batas minimumnya 0 tahun. Batas maksimum tersebut mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum setara lulus Sekolah Menengah Atas (SMA).

2.4.3. Hidup Layak

Dimensi ketiga untuk mengukur kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan yang lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya perekonomian. Untuk menghitung paritas daya beli, BPS menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita

yang disesuaikan. Nilai maksimum yang dipakai BPS adlah sebesar Rp 26.572.353 dan nilai minimum sebesar Rp 1.007.436.

Tabel 2.1 Dimensi, Indikator dan Indeks Pembentuk IPM

Dimensi	Indikator	IndeksDimensi	IPM
Umur panjang dan sehat	Angka harapan hidup pada saat lahir (e_0)	Indeks harapan hidup→Indeks X1	
Pengetahuan	1.Harapan lama Sekolah (EYS) 2.Rata-rata lama sekolah (MYS)	Indeks pendidikan→Indeks X2	
Kehidupan yang layak	Pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan (PPP Rupiah)	Indeks pendapatan→Indeks X3	

Tabel 2.2. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM yang digunakan dalam penghitungan

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	20	85	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP U\$)	1.007.436* (Rp)	107.721 (PPP U\$)	26.572.352** (Rp)

Sumber:Indonesia Human Development Report 2001 – Towards a New Consensus (Democracy and Human Development in Indonesia) – BPS, BAPPENAS, UNDP

- a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018
- b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru

Seperti dalam rekomendasi UNDP, meskipun telah muncul berbagai kritik dan masukan berkaitan dengan rumusan indikator variabel IPM, hingga saat ini masih digunakan ketiga komponen diatas, yaitu komponen kesehatan (*Longevity*) yang diwakili dengan usia harapan hidup

(*life expectancy at Age 0; e_0*), komponen pengetahuan atau kecerdasan diwakili oleh dua buah indikator yaitu Harapan lama sekolah (*Expectancy Years School/ EYS*) dan rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling/ MYS*) dan indikator hidup layak (*decent living*) atau kemakmuran yang diwakili oleh paritas daya beli (*purchasing power parity; PPP*). Berhubung data PPP sulit diperoleh, maka terkadang sering digunakan PDRB riil per kapita.

2.5. Teknik Penghitungan IPM dengan Metode Baru

2.5.1. Angka Harapan Hidup (AHH)

Data yang dibutuhkan untuk memperoleh Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup (AHH) dengan Mortpak adalah estimasi rata-rata jumlah anak lahir hidup pada tahun penghitungan dan estimasi rata-rata jumlah anak masih hidup pada tahun penghitungan. Penentuan AHH untuk IPM secara umum berlaku rata-rata q_2 , q_3 dan q_5 ; adakalanya memakai median/modus lebih cocok; perlu pertimbangan keahlian (*adjustment*), pengalaman, trend atau perbandingan (*antarwaktu, antarwilayah, antarurban/rural, dsb*); AHH perempuan diperoleh dari: $(106/103) \times \text{AHH total}$; sudah melalui rekonsiliasi dan telah diseminarkan pada seminar parameter demografi.

Penentuan asumsi berdasarkan tren tingkat mortalitas di masa lalu mengikuti hasil SDKI: SDKI91, SDKI94, SDKI97, SDKI2002/3, SDKI2007, SDKI2012. Menggunakan 6 titik pengamatan (1991-2012) tanpa target.

Adapun rumus dalam menghitung tren tingkat mortalitas sebagai berikut :

$$y = L + \frac{U}{1 + be^{at}}$$

- Y = Perkiraan IMR
- L = Konstanta *asymtot* bawah IMR
- U = Konstanta *asymtot* atas IMR
- a,b = Koefisien kurva logistik
- t = Waktu sebagai variabel bebas
- e = Konstanta eksponensial

Rumus indeks kesehatan dapat disajikan sebagai berikut:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Masing-masing indeks komponen IPM tersebut merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimum dan nilai minimum indikator yang bersangkutan. Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut adalah antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam laporan ini indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran, seperti yang disarankan oleh BPS (BPS-UNDP, 1996).

Masing-masing indeks dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{Indeks Harapan Hidup} = \frac{AHH - 20}{85 - 20} \times 100$$

Dimana : e_0 = angka harapan hidup

20 = angka minimum harapan hidup (UNDP)

85 = angka maksimum harapan hidup (UNDP)

2.5.2. Harapan Lama Sekolah

Langkah pertama yaitu menghitung jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas); langkah kedua menghitung jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur (7 tahun ke atas); langkah ketiga menghitung rasio penduduk yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk menurut umur (7 tahun ke atas), langkah ini menghasilkan partisipasi sekolah menurut umur; langkah keempat menghitung harapan lama sekolah, yaitu dengan menjumlahkan semua partisipasi sekolah menurut umur (7 tahun ke atas).

Formula yang digunakan yaitu :

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i = Usia ($a, a + 1, \dots, n$)

FK = Faktor koreksi pesantren

2.5.3. Rata-Rata Lama Sekolah

Secara rinci penghitungan indikator rata-rata lama sekolah dilakukan dengan cara penghitungan tidak langsung. Terdapat empat kombinasi variabel pembentuk indikator rata-rata lama sekolah diantaranya, Angka Partisipasi Sekolah; jenjang pendidikan yang pernah diduduki; kelas yang sedang dijalani; dan jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Langkah pertama adalah menyeleksi penduudk usia 25 tahun ke atas; langkah kedua yaitu menghitung lamanya sekolah, jika partisipasi sekolah yaitu tidak/belum pernah sekolah, maka lama sekolah = 0, jika partisipasi sekolah yaitu masih sekolah atau tidak bersekolah lagi, maka lama sekolah mengikuti tabel konversi berikut :

Tabel 2.5 Konversi Lama Sekolah

Keterangan	Lama Sekolah
(1)	(2)
Masih bersekolah di SD s.d S1	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Masih bersekolah S2 atau S3	Konversi ijazah terakhir + 1 Ket : karena di Susenas kode kelas untuk yang sedang kuliah S2 = 6 dan kuliah S3 = 7 yang tidak menunjukkan kelas
Tidak bersekolah lagi tetapi tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Tidak bersekolah lagi dan tamat pada jenjang	Konversi ijazah terakhir

Tabel 2.6.
Konversi Lama Sekolah berdasarkan Ijazah Terakhir untuk
Menghitung Rata-rata Lama Sekolah (MYS)

Ijazah	Konversi tahun Lama sekolah
(1)	(2)
Tidak punya	0
SD/MI/Sederajat	6
SLTP/MTs/Sederajat/Kejuruan	9
SMU/MA/Sederajat/Kejuruan	12
Diploma I/II	14
Diploma III/Sarjana Muda	15
Diploma IV/S1	16
S2/S3	18

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

Langkah ketiga yaitu menghitung rata-rata lama sekolah dengan rumus :

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$$

Keterangan:

RLS : Rata-rata Lama Sekolah di suatu wilayah

Lama sekolah penduduk - i : lama sekolah penduduk ke-i di suatu wilayah

n : jumlah penduduk ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)

Rumus indeks pengetahuan dapat disajikan sebagai berikut:

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{\text{HLS}} + I_{\text{RLS}}}{2}$$

yang terdiri dari: **1. Indeks Harapan Lama Sekolah** :

$$I_{\text{HLS}} = \frac{\text{HLS} - \text{HLS}_{\min}}{\text{HLS}_{\max} - \text{HLS}_{\min}}$$

2. Indeks Rata-Rata Lama Sekolah :

$$I_{\text{RLS}} = \frac{\text{RLS} - \text{RLS}_{\min}}{\text{RLS}_{\max} - \text{RLS}_{\min}}$$

2.5.4. Purchasing Power Parity (PPP)

Kemampuan Daya Beli (PPP) memberikan gambaran tentang kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat dikatakan memenuhi standar hidup layak. Paritas daya beli dihitung sebagai perbandingan rata-rata geometrik harga paket komoditas barang dan jasa di suatu wilayah terhadap Jakarta Selatan.

Kemampuan Daya Beli (PPP) dapat dihitung dengan langkah sebagai berikut :

Langkah pertama, yaitu menghitung rata-rata pengeluaran per kapita; langkah kedua yaitu menghitung rata-rata pengeluaran per kapita dalam harga konstan (riil); langkah ketiga yaitu menghitung Paritas Daya Beli; langkah keempat yaitu menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan.

Penghitungan rata-rata pengeluaran perkapita dilakukan dengan 3 tahap, yaitu menghitung pengeluaran per kapita (anggota rumah tangga) untuk setiap rumah tangga; menghitung rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap kabupaten; menghitung rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dalam ribuan (Y'_t) = rata-rata pengeluaran per kapita per bulan x 12 / 1000.

- Menghitung nilai riil rata-rata pengeluaran per kapita per tahun (atas dasar tahun 2012) dengan rumus:

$$Y_t^* = \frac{Y'_t}{IHK_{(t,2012)}} \times 100$$

Y_t^* = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Y'_t = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

$IHK_{(t,2012)}$ = IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

- Menghitung paritas daya beli dilakukan dengan 3 tahap, yaitu
 - Tahap pertama menghitung harga rata-rata komoditas terpilih dengan rumus :

$$P_i = \frac{V_i}{Q_i}$$

Keterangan:

- P_i = Rata-rata harga komoditi i per satu satuan di suatu wilayah
- V_i = Total value (biaya) yang dikeluarkan untuk komoditi i di suatu wilayah
- Q_i = Total kuantum dari komoditi i yang dikonsumsi di suatu wilayah

Untuk harga yang tidak terdapat pada Susenas Modul Konsumsi, harga diperoleh dari IHK, yaitu :

- Perlengkapan mandi → pasta gigi, sabun mandi, shampo, sikat gigi
- Barang habis pakai rumah tangga → bola lampu, lampu TL/neon, korek api gas, obat nyamuk bakar, pembasmi nyamuk cair, pembasmi nyamuk spray, pembersih lantai
- Sabun cuci → sabun cuci piring, sabun *cream detergent*
- Barang kecantikan → bedak, deodorant, body lotion, lipstik, minyak rambut, minyak parfum, pelembap muka, pembersih dan penyegar
- Perawatan kulit, kuku, muka, rambut → tarif creambath, potong rambut pria, potong rambut wanita, potong rambut anak
- Biaya kesehatan → biaya dokter umum
- SPP → SD
- Transportasi → angkutan dalam kota
- Alas kaki → sandal kulit pria
- Meubelair → meja kursi tamu
- Peralatan rumah tangga → lemari es
- Perlengkapan perabot rumah tangga → spreng
- Alat dapur/makan → kompor

- Tahap kedua yaitu menghitung paritas daya beli dengan rumus berikut

$$\text{Paritas Daya Beli}_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Keterangan :

p_{ij} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

p_{ik} : harga komoditas i di kab/kota j

m : jumlah komoditas

Tabel 2.7 Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Kemampuan Daya Beli (PPP)

Kelompok	Share kelompok		
		Share	Jumlah item
MAKANAN	47,29	39,82	66
Padi-padian	8,02	7,89	2
Umbi-umbian	0,42	0,23	2
Ikan/udang/cumi/kerang	3,95	2,30	7
Daging	2,06	1,69	3
Telur dan susu	2,76	2,37	4
Sayur-sayuran	3,56	2,04	7
Kacang-kacangan	1,26	1,17	2
Buah-buahan	2,21	1,22	7
Minyak dan lemak	1,79	1,75	3
Bahan minuman	1,64	1,47	3
Bumbu-bumbuan	0,95	0,40	3
Konsumsi lainnya	1,00	0,61	1
Makanan dan minuman jadi	11,80	10,94	19
Tembakau dan sirih	5,88	5,72	3
NON MAKANAN	52,71	33,81	30
Perumahan dan fasilitas rumah tangga	20,58	15,74	10
Aneka barang dan jasa	18,79	13,50	12
Pakaian, alas kaki,tutup kepala	3,76	3,35	4
Barang tahan lama	6,15	1,22	4
Pajak, pungutan, asuransi	1,65	0,00	0
Keperluan, pesta, upacara/kenduri	1,78	0,00	0
TOTAL	100,00	73,63	96

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional

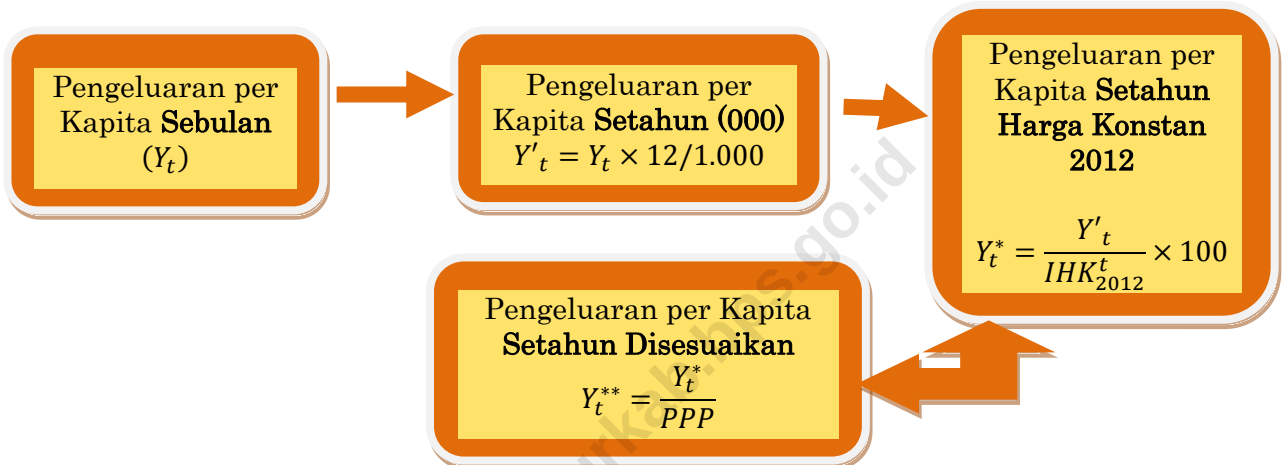
- Tahap ketiga, menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan rumus berikut:

$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{\text{Paritas Daya Beli}}$$

Keterangan : Y_t^{**} :rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan

Y_t^* :Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Ilustrasi Penghitungan Pengeluaran per Kapita Disesuaikan



Rumus Indeks Pendapatan berikut:

$$I_{\text{pendapatan}} = \frac{\ln(\text{pendapatan}) - \ln(\text{pendapatan}_{\min})}{\ln(\text{pendapatan}_{\max}) - \ln(\text{pendapatan}_{\min})}$$

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}}$$

2.6. Konsep dan Definisi Disparitas Pembangunan Manusia dan Kecepatan Perubahan IPM (*Shortfall*).

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bernilai kisaran antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM yang dicapai suatu daerah hampir tidak mungkin bernilai 100. Jarak relatif antara nilai ideal IPM (yaitu 100) dengan nilai IPM yang telah dicapai oleh suatu daerah pada suatu periode itulah yang dinamakan *Shortfall*.

Angka *shortfall* dapat dipengaruhi sebagai indikator perkembangan (kecepatan perubahan) pembangunan manusia di suatu daerah. Dengan demikian, tantangan bagi masing-masing daerah adalah bagaimana cara memaksimalkan nilai *shortfall* mereka (mendekatkan nilai IPM yang diperoleh sedekat-dekatnya dengan nilai IPM ideal). Terdapat sebuah kecenderungan dalam pencapaian IPM, jika nilai IPM semakin mendekati nilai maksimum (100), maka pertumbuhannya akan semakin lambat. Sebaliknya jika angka capaian IPM masih berada pada level yang rendah maka kemampuan untuk memacu pertumbuhan yang tinggi dalam capaian IPM akan lebih mudah.

Prosedur penghitungan reduksi shortfall IPM ($= r$; dikutip dari Arizal Ahnaf dkk, 1998;141) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$R = \left(\left[\frac{IPM_{(t_1)} - IPM_{(t_0)}}{IPM_{(ref)} - IPM_{(t_0)}} \right] \times 100 \right)^{1/n}$$

dengan :

R = reduksi shortfall per tahun;

$IPM_{(t_0)}$ = IPM tahun awal;

$IPM_{(t_1)}$ = IPM tahun terakhir; dan

$IPM_{(ref)}$ = IPM acuan atau ideal yang dalam hal ini sama dengan 100

2.7. Klasifikasi/tingkatan status IPM

Pengklasifikasian pembangunan manusia bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam dalam hal pembangunan manusia.

Tingkatan status pembangunan manusia suatu wilayah oleh UNDP dibagi ke dalam tiga golongan yaitu (a) **Rendah** apabila IPM kurang dari 60, (b) **Sedang atau menengah** apabila IPM antara 60-70, (c) **Tinggi** apabila IPM antara 70-80 dan (d) **sangat tinggi** apabila IPM lebih dari 80 ke atas. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:



2.8. Konsep/Istilah dan Definisi

Untuk memudahkan para pengguna data memahami beberapa konsep/istilah yang mungkin masih belum/kurang terbiasa, berikut ini diuraikan beberapa konsep/istilah dan definisi dengan harapan agar para pengguna/konsumen data menjadi lebih mudah untuk memahami publikasi ini

- Angka Harapan Hidup (AHH) pada waktu lahir (e_0)** : adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka ini mencerminkan status kesehatan penduduk atau keadaan sosial ekonomi penduduk dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Interpretasi, semakin tinggi angka harapan hidup maka semakin berhasil pembangunan dibidang sosial ekonomi suatu daerah terutama dibidang kesehatan.
- Harapan Lama Sekolah**, adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa

mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar

- c. **Rata-rata Lama Sekolah**, adalah jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk yang berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang sedang/pernah dialami.
- d. **Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity/PPP)**, PPP memungkinkan dilakukannya perbandingan harga-harga riil antar propinsi dan antar kabupaten/kota mengingat nilai tukar yang biasa digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli yang terukur dari konsumsi perkapita yang telah disesuaikan dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di satu propinsi memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil perkapita setelah disesuaikan dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan penurunan utilitas marginal yang dihitung dengan rumus Atkinson.
- e. **Indeks Harapan Hidup**, adalah salah satu dari tiga komponen indeks pembangunan manusia. Nilai indeks ini berkisar 0 - 100.
- f. **Indeks Pendidikan**, adalah merupakan salah satu dari tiga komponen indeks pembangunan manusia. Indeks ini didasarkan pada kombinasi antara angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, nilai indeks tersebut berkisar 0 hingga 100.
- g. **Indeks Paritas Daya Beli**, adalah salah satu dari tiga komponen indeks pembangunan manusia yang didasarkan pada paritas daya beli (PPP) disesuaikan dengan rumus Atkinson. Nilai indeks berkisar antara 0 - 100.

B A B 3

GAMBARAN UMUM

3.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten paling timur di Propinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis Kabupaten Luwu Timur terletak pada posisi antara $2^{\circ} 03'00''$ - $3^{\circ} 00'25''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ} 28'56''$ - $121^{\circ} 47'27''$ Bujur Timur. Selanjutnya batas wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut :

- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah,
- ❖ Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone,
- ❖ Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, dan
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara.

Ibukota Kabupaten Luwu Timur adalah Malili. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur sekitar 6.944,88 km² atau sekitar 11,14 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini terdiri dari 11 kecamatan, 125 desa (termasuk UPT) dan 3 kelurahan (Kecamatan Malili, Nuha, dan Tomoni).

Kabupaten Luwu Timur merupakan wilayah yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Selama tahun 2014, tercatat rata-rata curah hujan mencapai 267 mm, dengan rata-rata jumlah hari hujan per bulan mencapai 17 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April, yakni 485 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 23 hari dalam sebulan.

Terdapat 14 sungai yang mengalir di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Sungai terpanjang adalah Sungai Kalaena dengan panjang 85 km. Sungai tersebut melintas di Kecamatan Mangkutana. Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat 5 danau. Kelima danau tersebut adalah Danau Matano yang berada di Kecamatan Nuha, sedangkan Danau Mahalona, Danau Towuti, Danau Taparang Masapi, dan Danau Lantoa berada di Kecamatan Towuti. Danau yang terdalam adalah Danau Matano (589 m) dan danau yang terluas adalah Danau Towuti (585 km²).

3.2. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur tahun 2014 berdasarkan hasil proyeksi penduduk adalah sebanyak 269.405 jiwa meningkat 2,62

persen dibanding tahun sebelumnya dengan rincian 51,41 persen penduduk laki-laki dan sisanya 48,59 persen penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sekitar 105,81 yang berarti bahwa diantara 100 perempuan terdapat sekitar 106 laki-laki. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Luwu Timur berdasarkan hasil proyeksi penduduk tahun 2014 sekitar 2,60 persen, meningkat jika dibandingkan tahun lalu sebesar 2,43 persen.

Berdasarkan tabel 3.1, tampak bahwa penduduk laki-laki yang mendominasi pada kelompok umur 0-14 tahun dan 15-64 tahun, sedangkan penduduk perempuan lebih mendominasi di usia 65 tahun ke atas, artinya harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Secara umum penambahan penduduk terlihat pada semua kelompok umur.

Tabel 3.1
Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 dan 2014

JK	Kelum		2013			2014		
	Laki laki	Perempua n	Total	Rasio JK	Laki laki	Perempua n	Total	Rasio JK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0-14	0-14	44.233	42.022	86.255	105,2 6	44.810	42.669	87.479
15-64	15-64	85.908	80.568	166.47 6	106,6 3	88.373	82.839	171.21 2
65+	65+	5.078	5.203	10.281	97,59	5.269	5.418	10.687
Jumla h	Total	135.219	127.79 3	263.01 2	105,8 1	138.479	130.92 6	269.40 5

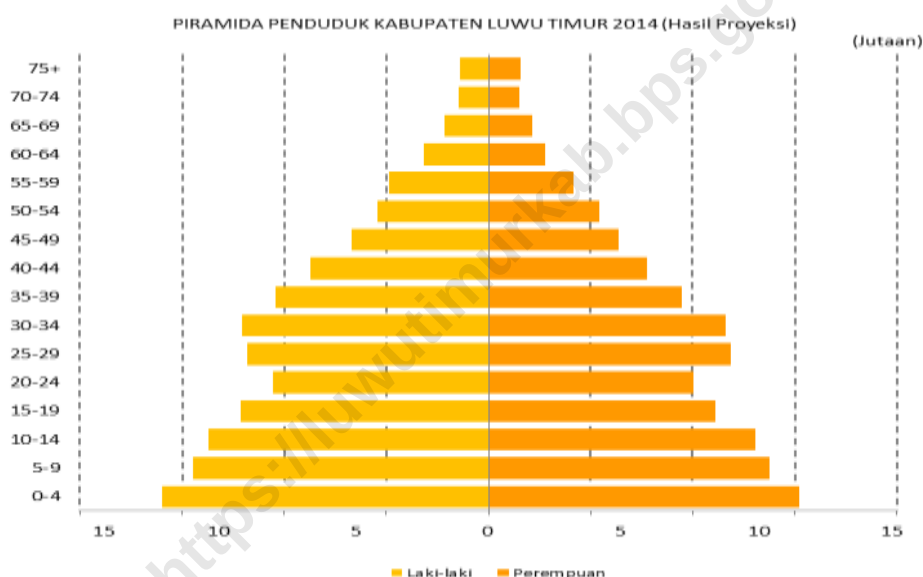
Sumber : Angka Proyeksi 2010-2020, BPS Sulsel

Komposisi penduduk juga mencerminkan angka beban tanggungan (ABT) yaitu perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (umur 15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif (umur di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas). Penduduk Kabupaten Luwu Timur yang berusia 0-14 tahun pada tahun 2014 sekitar 32,47 persen turun dibanding tahun sebelumnya sekitar 32,79 persen. Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran di daerah ini sedikit mengalami penurunan.

Pada gambar piramida berikut nampak bahwa jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur masih didominasi oleh kelompok umur 0 - 4 tahun

sekitar 11,86 persen dari total penduduk, dengan persentase lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Sedangkan persentase penduduk terkecil sebesar 1,13 persen berada pada kelompok umur 70-74 tahun. Oleh karena itu penduduknya dikatakan penduduk menengah karena pemusatan penduduknya berada pada selang 20-29 tahun. Jenis piramidanya adalah piramida stasioner berbentuk granat yaitu penduduk dalam keadaan tetap atau statis, sebab tingkat kematian rendah dan kelahiran menurun.

Gambar 1.



Jumlah penduduk pada kelompok umur 20-24 tahun mengalami pengurangan, artinya bahwa banyak penduduk Kabupaten Luwu Timur yang pindah atau migrasi dikarenakan melanjutkan studi ke jenjang pendidikan perguruan tinggi ke daerah lain disebabkan karena jumlah perguruan tinggi di Luwu Timur sangat sedikit. Hal ini dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah setempat supaya menambah jumlah perguruan tinggi di Kabupaten Luwu Timur sehingga kualitas SDM semakin baik dari segi pendidikan. Selain itu menambah sarana dan prasarana pendidikan yang lain seperti sekolah dari tingkat dasar hingga menengah, mempermudah akses ke tempat fasilitas pendidikan, dll.

Sebaliknya jumlah penduduk pada kelompok umur 30-34 tahun bertambah disebabkan oleh banyaknya penduduk yang berasal dari daerah

lain migrasi ke Kabupaten Luwu Timur untuk mendapatkan pekerjaan. Kelompok umur ini didominasi oleh laki-laki yang memang bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Sedangkan pada kelompok umur 25-29 tahun yang didominasi oleh perempuan, kemungkinan penyebabnya adalah bahwa penduduk usia 20-24 tahun telah kembali dari masa pendidikannya dengan asumsi bahwa lebih banyak perempuan yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Fenomena ini dapat dijadikan pertimbangan pemerintah kabupaten untuk menambah jumlah lapangan kerja yang sesuai pada usia 25-34 tahun.

Angka Beban Ketergantungan (ABT) penduduk Kabupaten Luwu Timur cenderung mengalami penurunan. Persentase penduduk usia tidak produktif semakin menurun sebaliknya persentase usia produktif semakin meningkat sehingga pada akhirnya nanti akan dihasilkan bonus demografi dimana ABT di bawah 50 persen. Setelah dihitung maka ABT pada tahun 2014 adalah sebesar 57,35. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2014 menanggung beban ekonomi sekitar 57-58 orang usia tidak produktif. Angka beban tanggungan ini relatif sama bila dibanding tahun 2013.

Hal yang penting juga adalah istilah *aging population*, yaitu berapa besar populasi penduduk yang berusia 60 lebih. Suatu wilayah dikatakan masuk dalam kategori *aging population* jika penduduk usia 60 lebih berjumlah lebih dari 10 persen. Kabupaten Luwu Timur yang merupakan salah satu wilayah transmigrasi di Sulawesi Selatan sampai saat ini masih belum mencapai fase *aging population*.

3.3. Kesehatan

3.3.1 Angka Harapan Hidup dan Penolong Persalinan

Tujuan dari pembangunan manusia dibidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat. peningkatan derajat kesehatan masyarakat dapat diukur dari tingkat mortalitas dan morbiditas penduduknya. salah satu yang menentukan angka harapan hidup adalah kematian bayi. Resiko kematian bayi lebih besar bagi bayi yang dilahirkan oleh ibu yang kekurangan gizi, dibandingkan dengan ibu yang memiliki gizi cukup.

Pada umumnya kekurangan gizi berkorelasi positif dengan keadaan sosial ekonomi yang rendah. Penyebab tingginya angka kematian bayi selain karena masalah infeksi/penyakit dan berat bayi lahir lebih rendah, juga berkaitan erat dengan kondisi pada fase kehamilan, pertolongan kelahiran yang aman dan perawatan bayi pada saat dilahirkan.

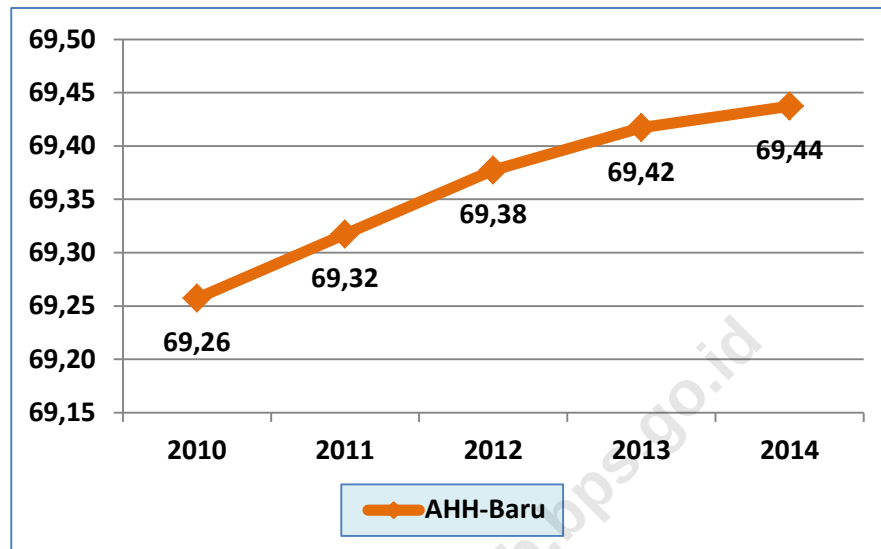
Tabel 3.2.
Persentase Balita Menurut Penolong Persalinan Terakhir
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2014

Penolong Persalinan	2010	2011	2012	2013	2014
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
Tenaga Medis	75,40	75,85	79,16	78,62	82,95
Dokter	13,52	9,22	10,40	11,74	12,76
Bidan	61,88	66,63	68,76	66,88	70,19
Tenaga Non Medis	24,60	24,15	20,84	21,38	17,05
Dukun	22,17	21,02	16,70	20,45	14,21
Keluarga	2,43	3,13	4,14	0,75	2,54
Lainnya	-	-	-	0,18	0,30
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Dari tabel di atas dapat dilihat pada tahun 2010-2014 persentase penolong kelahiran tertinggi adalah bidan. Walaupun masih ada penolong kelahiran oleh dukun dan famili, namun persentasenya tergolong kecil. Hal ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat di Kabupaten Luwu Timur akan pentingnya kesehatan ibu dan bayi yang dilahirkan yang pada akhirnya akan meningkatkan angka harapan hidup.

Angka Harapan Hidup (AHH; e_0) merupakan salah satu indikator pembentuk IPM sebagai salah satu ukuran derajat kesehatan masyarakat. Menurut Statistik Indonesia, Angka Harapan Hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth*) ialah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Angka Harapan Hidup di suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya tergantung dari kualitas hidup yang mampu dicapai oleh penduduk.

Grafik 3.1.
(AHH; e_0) Kabupaten Luwu Timur, 2010-2014 (Tahun)



AHH Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2014 dengan menggunakan metode baru dari tahun ke tahun semakin menunjukkan peningkatan namun tidak terlalu signifikan. Terdapat beberapa variabel yang diperkirakan berpengaruh terhadap AHH; e_0 , diantaranya adalah angka kematian bayi, persentase bayi berusia 0-11 bulan yang diberi ASI selama 4-6 bulan, dan variabel persentase balita berusia 1-4 tahun yang mendapatkan imunisasi lengkap.

Selain faktor penanganan pada saat persalinan, tinggi rendahnya AKB juga dipengaruhi oleh kualitas gizi berupa pemberian air susu ibu (ASI). Di Kabupaten Luwu Timur kesadaran para ibu untuk memberikan ASI pada anaknya, nampaknya cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh hasil Susenas pada tahun 2014, dari total penduduk usia balita ternyata yang telah diberikan ASI sudah mencapai 95,79 persen meningkat bila dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemberian ASI untuk balita paling banyak diberikan selama 12-17 bulan yaitu sekitar 26,53 persen pada tahun 2014 meningkat dibandingkan tahun lalu. Terdapat sekitar 4,21 persen balita yang tidak pernah menyusui pada tahun 2014 menurun dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 3.3
Persentase Balita Menurut Lamanya Disusui (bulan) dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 dan 2014

Lama Disusui (bulan)	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki+ Perempuan	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Tidak pernah menyusui	3,88	3,55	4,95	5,01	4,38	4,21
1-5	23,14	15,79	20,40	18,7	21,88	17,10
6-11	13,66	19,41	18,65	20,66	15,96	19,98
12-17	24,88	24,21	24,23	29,35	24,58	26,53
18 - 23	12,00	12,78	9,25	14,68	10,74	13,64
24 +	22,44	24,26	22,51	11,6	22,47	18,54
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2013 dan 2014

Sisi lain yang menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan penduduk seharusnya diperlihatkan oleh rata-rata hari sakit yang dialami penduduk dari tahun ke tahun semakin menurun. Hal ini sejalan dengan perkembangan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, kemudahan akses ke sarana/fasilitas kesehatan, serta program gratis berobat yang telah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Luwu timur. Dengan berbagai kemudahan yang ada tersebut memberikan efek positif terhadap kesehatan penduduk yakni, penyakit yang diderita akan lebih awal dan pada akhirnya akan memperpendek rentang waktu hari sakit sebagaimana tertera pada tabel 3.4.

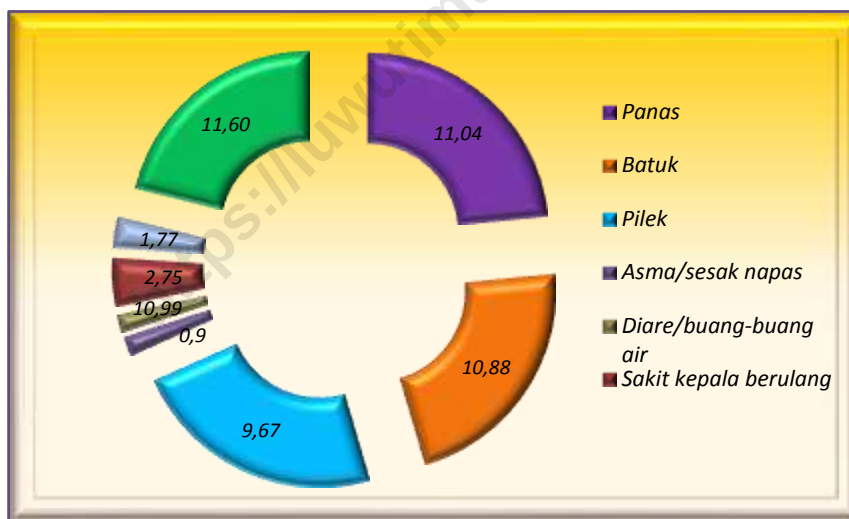
Penduduk yang menderita sakit selama sebulan terakhir pada periode survei sebagian besar sembuh kurang dari empat hari. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan kesehatan di Kabupaten Luwu Timur cukup bagus dengan menangani pasien dengan cepat dan baik. Tiga jenis keluhan kesehatan yang sering dialami oleh penduduk Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2014, diantaranya adalah panas, pilek dan batuk dengan persentase masing-masing mengalami penurunan dibanding tahun 2013. Meskipun ketiga jenis keluhan tersebut tergolong ringan, relatif mudah diobati serta obatnya mudah didapatkan di pasaran, tetap mengganggu aktivitas sehari-hari.

Tabel 3.4.
Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan yang Lalu Menurut Jenis Kelamin dan Lama Hari Sakit, 2013-2014

Lama Hari Sakit	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki+ Perempuan	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
<4	50,50	69,47	59,42	57,08	54,87	61,07
4-7	32,42	23,37	24,29	24,71	28,44	24,03
8-14	4,79	2,39	5,22	7,13	5,00	4,73
15-21	2,09	0,73	2,85	2,93	2,46	1,82
22-30	10,21	8,54	8,21	8,15	9,23	8,35
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2013-2014

Grafik 3.2.
Persentase Penduduk Menurut Jenis Keluhan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014



Sumber : Susenas 2013-2014

3.3.2 Pemberian Imunisasi

Salah satu indikator kesehatan bagi balita adalah pemberian imunisasi. Imunisasi atau vaksinasi adalah memasukkan kuman atau racun penyakit tertentu yang sudah dilemahkan (vaksin) ke dalam tubuh dengan cara diminum (diteteskan dalam mulut) atau disuntikkan, dengan maksud agar terjadi kekebalan tubuh terhadap penyakit tersebut.

Tabel 3.5.
Persentase Balita yang Mendapatkan Imunisasi Menurut Pemberian
Imunisasi dan Jenis Kelamin di Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2013 dan 2014

Jenis Imunisasi	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki+ Perempuan	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
BCG	98,04	92,55	98,28	96,97	98,15	94,55
DPT	94,07	91,29	94,96	94,78	94,48	92,87
Polio	93,21	91,66	94,96	93,74	94,02	92,60
Campak/Morbili	82,20	79,15	83,15	82,92	82,64	80,55
Hepatitis B	92,23	89,36	94,96	92,51	93,49	90,78

Sumber : Susenas 2013 - 2014

Pada tahun 2014, persentase balita yang sudah mendapat imunisasi di Kabupaten Luwu Timur sekitar 94,95 persen meningkat 3,2 point dibanding tahun lalu. Pada umumnya balita laki-laki maupun perempuan telah mendapat imunisasi BCG yang diberikan satu minggu setelah bayi lahir untuk mencegah penyakit TBC.

Persentase balita yang mendapat imunisasi DPT yaitu sekitar 92,87 persen pada tahun 2014 menurun dibanding tahun sebelumnya. Pemberian imunisasi jenis ini dimaksudkan untuk mencegah penyakit difteri, pertusis dan tetanus, diberikan pada bayi berumur 3 bulan atau lebih. Selanjutnya imunisasi yang berfungsi untuk mencegah penyakit polio, yang diberikan pada bayi berumur 3 bulan ke atas yaitu imunisasi polio dengan persentase balita yang mendapat imunisasi ini sekitar 92,6 persen pada tahun 2014. Sementara itu sekitar 80,55 persen balita sudah mendapat imunisasi campak/morbili dimaksudkan untuk mencegah penyakit campak/ morbili yang diberikan pada bayi berumur 9 sampai 12 bulan. Kemudian pemberian imunisasi Hepatitis B pada bayi untuk mencegah penyakit hepatitis B sekitar 90,78 persen pada tahun 2014 menurun dibanding tahun lalu.

3.4. Pendidikan

Sumber daya manusia sangat penting peranannya dalam proses pembangunan. Untuk itu, pembangunan yang dilakukan sebaiknya bermuara

pada pembangunan manusia. Salah satu komponen dalam pembangunan manusia adalah peningkatan di bidang pendidikan, karena merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Luwu Timur sangat konsisten dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Program Pembangunan yang dilakukan di antaranya perluasan dan pemerataan di dalam memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat melalui peningkatan anggaran pendidikan secara berarti. Disamping itu dilakukannya sekolah gratis sampai dengan tingkat SMU.

Program pendidikan mempunyai andil yang sangat besar terhadap kemajuan bangsa, ekonomi dan sosial. Sehingga keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan merupakan salah satu parameter untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat. Pasal 31 ayat 2 UUD 1945 beserta amandemennya menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Landasan ini memberikan gambaran bahwa pemerintah serius dalam upaya meningkatkan kualitas SDM bidang pendidikan. Dengan semakin tingginya akses terhadap fasilitas pendidikan, diharapkan semakin banyak pula penduduk yang dapat bersekolah, sehingga pemerataan pendidikan dapat terwujud.

Berkaitan dengan hal tersebut, bab ini menyajikan secara umum keadaan pendidikan di Kabupaten Luwu Timur dari beberapa indikator diantaranya Rasio Murid Guru, Rasio Murid Sekolah, partisipasi sekolah, angka melek huruf, dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

3.4.1. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar merupakan dua hal yang memegang peranan penting terhadap maju mundurnya dunia pendidikan. Salah satu hal yang selama ini masih menjadi kendala adalah kelangkaan jumlah guru pada daerah-daerah terpencil. Isu yang masih sering terdengar adalah sebagian besar guru enggan ditempatkan pada daerah terpencil, sehingga mengakibatkan menumpuknya jumlah guru di daerah-daerah perkotaan.

Untuk melihat ketersediaan guru pada suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan jumlah guru. Walaupun belum ada angka ideal sebagai patokan namun semakin kecil angka ini maka akan menggambarkan beban seorang guru yang semakin kecil pula.

Rasio Murid Guru (RMG) merupakan perbandingan jumlah murid dengan jumlah guru pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Rasio Murid Guru menggambarkan rata-rata banyaknya murid yang diajar oleh seorang guru. Kelihatannya ada kecenderungan makin sedikit murid yang ditangani seorang guru semakin baik proses belajar mengajar. Hal ini dikarenakan guru dengan mudah memantau aktifitas murid yang diajar dalam kelas, juga mudah mengukur prestasi belajar setiap siswa. Meskipun demikian, belum ada patokan tentang Rasio Murid Guru yang ideal dalam proses belajar mengajar.

Gambaran RMG untuk jenjang pendidikan SD, SLTP, dan SLTA dari tahun ajaran 2013/2014 dan tahun ajaran 2014/2015 ditunjukkan pada Tabel 3.6. Secara umum, RMG pada jenjang pendidikan dasar lebih tinggi dibanding pada jenjang pendidikan menengah dan atas.

RMG pada jenjang pendidikan SD/ sederajat pada tahun ajaran 2014/2015 sekitar 16,46 atau terdapat sekitar 16-17 murid diajar oleh seorang guru. Selanjutnya RMG pada jenjang pendidikan SLTP/ sederajat meningkat dibanding tahun lalu yaitu sekitar 12,69 atau terdapat sekitar 12-13 murid diajar oleh seorang guru. Sementara itu, RMG pada jenjang pendidikan SLTA/ sederajat sekitar 13,74 atau terdapat sekitar 13-14 murid/ siswa diajar oleh seorang guru.

Pada tahun ini jumlah murid maupun jumlah guru pada jenjang pendidikan semua jenjang mengalami (SD/ sederajat, SLTP/ sederajat, dan SLTA/ sederajat) peningkatan, diikuti dengan jumlah murid SD/ sederajat yang meningkat, namun murid SLTP/ sederajat, dan SLTA/ sederajat menurun, hal ini menyebabkan beban yang ditanggung seorang guru SD/ sederajat bertambah di tahun ini, namun beban yang ditanggung guru SLTP/ sederajat, dan SLTA/ sederajat berkurang. Dengan berkurangnya beban guru dalam mengajar diharapkan agar kualitas dalam mengajarnya akan meningkat.

Untuk melihat rata-rata banyaknya murid yang bersekolah dalam setiap jenjang pendidikan dapat diketahui dengan membandingkan jumlah murid terhadap sekolah (Rasio Murid Sekolah). Salah satu kegunaannya adalah untuk melihat apakah sudah waktunya pemerintah atau pihak swasta membangun sekolah baru pada suatu tempat.

Tabel 3.6. Banyaknya Murid, Sekolah dan Rasio Murid-Sekolah di Kabupaten Luwu Timur Tahun Ajaran 2013/2014 dan 2014/2015

Jenjang Pendidikan	2013/2014			2014/2015		
	Jumlah Murid	Jumlah Sekolah	RMS	Jumlah Murid	Jumlah Sekolah	RMS
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
SD/ sederajat	35.090	173	202,83	35.726	173	206,51
SLTP/ sederajat	16.099	57	282,44	15.890	60	264,83
SLTA/ sederajat	12.178	31	392,84	12.132	34	356,82

Sumber : Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2015

RMS di Kabupaten Luwu Timur pada tahun ajaran 2014/2015 menunjukkan penurunan dibanding pada tahun ajaran sebelumnya, kecuali pada jenjang pendidikan SD/ sederajat. RMS pada jenjang SD/ sederajat sebanyak 207 murid per sekolah pada tahun ajaran 2014/2015 meningkat dibanding tahun ajaran sebelumnya, kemudian untuk jenjang SLTP/ sederajat sebanyak 265 murid per sekolah dan untuk RMS pada jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat SLTA/ sederajat sebanyak 357 murid/siswa per sekolah.

3.4.2. Kemampuan Membaca dan Menulis

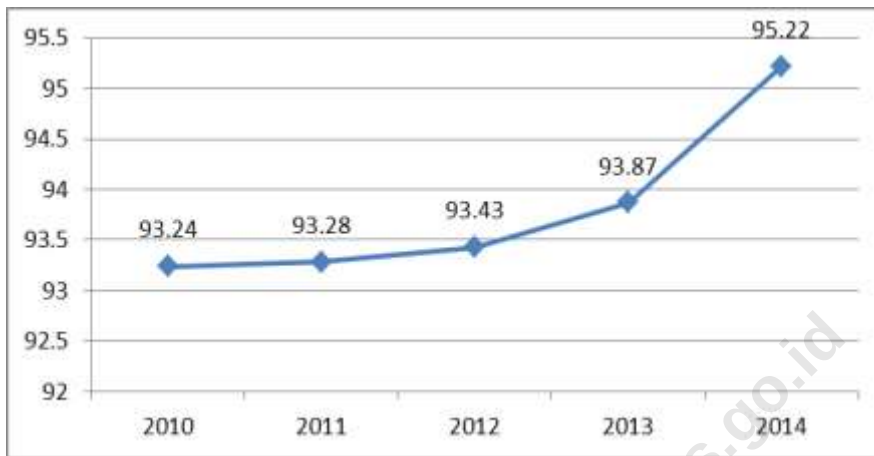
Kemampuan baca tulis adalah kemampuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia, sehingga diharapkan dengan meningkatnya kemampuan baca tulis maka akan meningkat akses terhadap berbagai informasi yang pada akhirnya pengetahuannya pun akan ikut meningkat. Kemampuan baca tulis tercermin dari angka melek huruf (AMH), dalam hal ini merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan

menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Yang dimaksud huruf lainnya misalnya huruf Arab, Bugis/Makassar, Jawa, Cina dan sebagainya. Sedangkan seseorang yang hanya dapat membaca atau menulis saja belum dianggap sebagai melek huruf.

Kemampuan baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas. Banyak analisis kebijakan menganggap angka melek huruf adalah tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah.

Dari hasil Susenas 2014 menunjukkan bahwa angka melek huruf (AMH) penduduk umur 15 tahun ke atas di Kabupaten Luwu Timur terjadi peningkatan sebesar 1,35 poin bila dibandingkan tahun 2013. Artinya penduduk yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya ada sebanyak 95,22 persen dari total penduduk berumur 15 tahun ke atas, sedangkan penduduk yang buta huruf terdapat sekitar 4,78 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya membaca dan menulis. Namun demikian, meningkatnya angka melek huruf masyarakat tidak bisa menjadi satu-satunya acuan dan bukti suatu daerah dikatakan maju pendidikannya. Angka Melek Huruf hanya bisa digunakan sebagai pondasi agar pendidikan dan kecerdasan masyarakat suatu daerah semakin berkembang, tetapi proses perubahan masyarakat melalui pendidikan harus terus didorong. Salah satu proses perubahan tersebut yaitu dengan terus menambah jumlah anak-anak yang bisa mengenyam bangku sekolah.

Grafik 3.4.
Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk
15 Tahun ke Atas di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2014



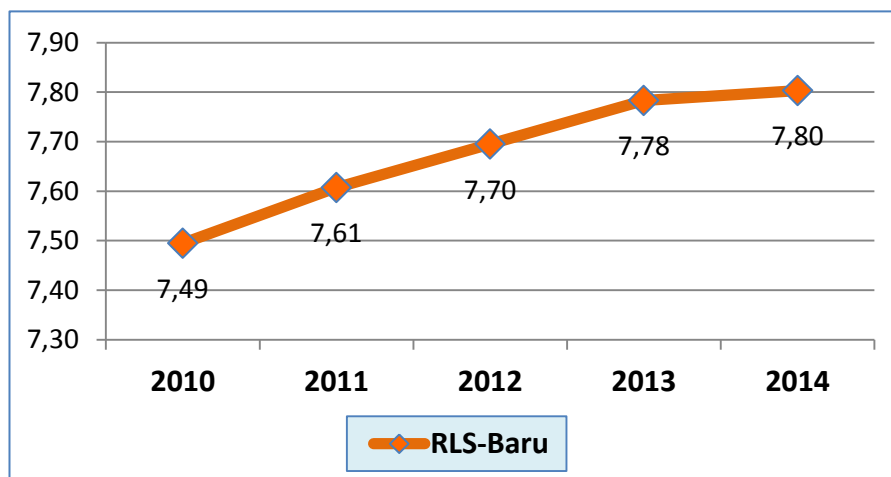
Sumber : Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2015

3.4.3. Rata-Rata Lama Sekolah

Selain Angka Melek Huruf (AMH), indikator penting lainnya yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di suatu daerah adalah Rata-Rata Lama Sekolah. Indikator ini dapat memberikan informasi tentang sejauh mana tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Luwu Timur dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan yang lambat. Seperti pada grafik 3.5, rata-rata penduduk usia sekolah baru menyelesaikan pendidikan selama 8 tahun yaitu sampai pada tingkat sekolah dasar atau sampai

Grafik 3.5.
Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2010-2014



tingkat SMP namun tidak tamat. Peningkatan rata-rata lama sekolah selama kurun waktu 6 tahun tersebut belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Jika dibandingkan dengan angka Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2014 yakni sekitar 8,01 tahun dan angka Indonesia sekitar 8,14 tahun, maka angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Luwu Timur termasuk cukup tinggi. Namun jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se Sulawesi Selatan, rata-rata lama sekolah Kab Luwu Timur berada peringkat ke enam setelah Kab Tana Toraja. Kota Makassar dan Palopo menempati urutan pertama dan kedua dengan rata-rata lama sekolah mencapai sekitar 10 tahun, artinya rata-rata usia sekolah menamatkan pendidikannya sampai tingkat SMA.

3.4.4. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Indikator penting lainnya yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pendidikan di suatu daerah adalah pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Tingkat pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan penduduk juga menjadi gambaran tingkat kesejahteraan rakyat dilihat dari tinggi rendahnya pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Sehingga potensi sumber daya manusia di suatu wilayah dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Dari tabel 3.6 dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kab Luwu Timur yang berusia 10 tahun ke atas hanya berpendidikan sampai tamat SD/ sederajat yaitu sekitar 27,23 persen, turun dibanding tahun sebelumnya, 18,27 persen yang menamatkan pendidikan SMP dan 18,53 persen yang tamat SMA, begitu juga dengan tamatan perguruan tinggi hanya 5,56 persen. Hal ini sesuai dengan rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas yang hanya sampai 8 tahunan yaitu setingkat SD atau SMP kelas 2.

Tabel 3.6.
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013-2014 (Persen)

Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan	Laki-Laki		Perempuan		Laki-Laki+ Perempuan	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Tidak/belum pernah sekolah	3,43	3,10	5,81	5,23	4,59	4,15
Tidak/belum tamat SD/ sederajat	23,36	22,96	21,75	23,02	22,58	22,99
SD/ sederajat	26,31	25,89	27,59	28,62	26,93	27,23
SLTP/ sederajat	17,46	17,61	20,27	18,95	18,83	18,27
SMU	18,96	20,30	14,45	16,69	16,77	18,53
SMA Kejuruan	4,31	5,20	2,27	1,27	3,32	3,27
Perguruan Tinggi	6,18	4,94	7,86	6,22	6,99	5,56
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2009-2014

3.4.5. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

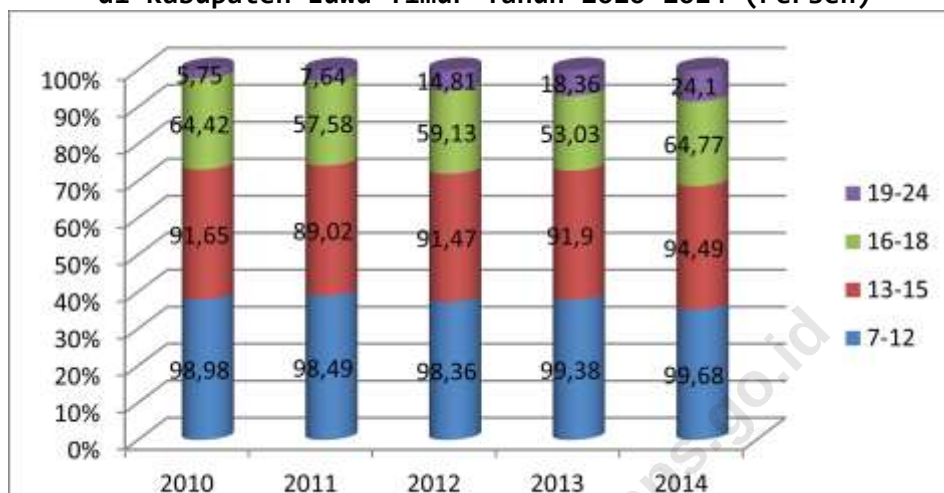
APS merupakan salah satu indikator yang menggambarkan secara umum mengenai banyaknya kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah tanpa memandang atau tanpa memperhatikan jejang pendidikan yang sedang diikuti. Keberhasilan pembangunan dibidang pendidikan juga dapat

dilihat dari peningkatan APS. Semakin banyak anak umur sekolah yang masih aktif sekolah maka program pemerintah di sektor pendidikan dapat dikatakan berhasil, namun sebaliknya jika persentase anak umur sekolah yang masih sekolah cenderung rendah maka program pemerintah dapat dinilai gagal. Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan tingkat partisipasi sekolah antara lain membangun sarana dan prasarana pendidikan dan memberikan subsidi bagi sekolah-sekolah negeri, sehingga penduduk yang kurang mampu juga dapat bersekolah. Selain itu mulai pertengahan tahun 2014, pemerintah telah meluncurkan program BSM (Bantuan Siswa Miskin) yang peruntukannya untuk siswa yang orang tuanya tidak mampu.

APS untuk SD misalnya, diperoleh dengan membagi jumlah penduduk usia Sekolah Dasar (7-12 tahun) yang masih/sedang sekolah pada setiap jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk usia Sekolah Dasar. Begitu juga perlakuannya pada jenjang SLTP, SLTA, dan sebagainya APS di sini adalah persentase penduduk umur tertentu yang masih sekolah terhadap seluruh penduduk usia tersebut.

Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2014, sekitar 4,59 persen penduduk Kabupaten Luwu Timur tidak/belum pernah sekolah, meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 4,43 persen. Begitu juga dengan jumlah penduduk yang tidak bersekolah lagi meningkat menjadi 73,45 persen. Penduduk yang tidak bersekolah lagi terdiri dari penduduk yang sudah menamatkan jenjang pendidikan yang dia ingin selesaikan dan penduduk yang terpaksa berhenti pada jenjang tertentu karena satu dan lain hal. Namun dari nilai APS pada jenjang pendidikan yang diwajibkan pemerintah (SD dan SMP) cukup tinggi (lebih dari 90 persen), hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk yang tidak bersekolah lagi tersebut memang menamatkan pendidikan pada jenjang yang memang ingin dia selesaikan.

Grafik 3.6.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Usia Sekolah
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2014 (Persen)



Sumber : Susenas 2010-2014

Peningkatan APS terjadi pada semua kelompok umur Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah penduduk yang sekolah di level SLTA menurun di banding tahun sebelumnya. Pertambahan APS pada jenjang SD, SLTP, dan Perguruan Tinggi terjadi karena sebagian besar penduduk pada level SD,SLTP, dan Perguruan Tinggi pada tahun sebelumnya tetap melanjutkan jenjang pendidikannya. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.

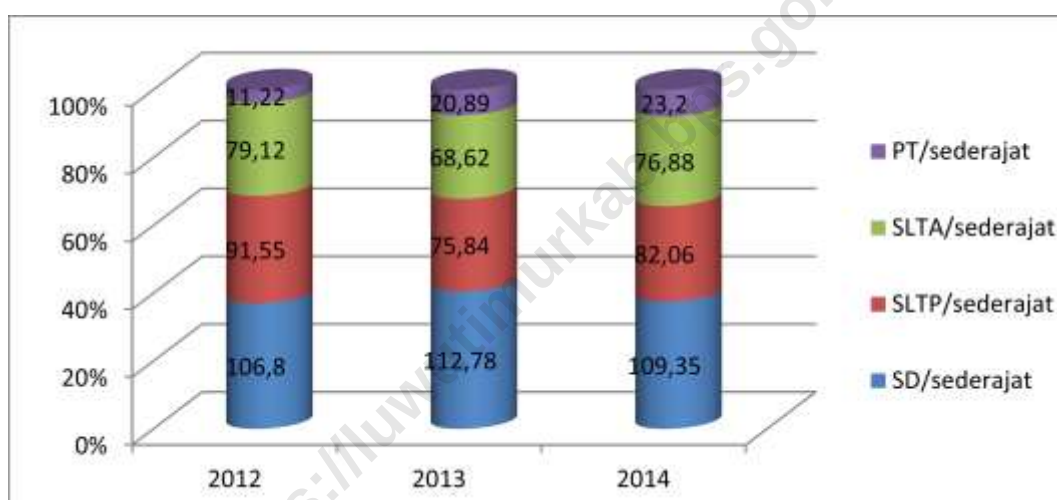
3.4.6. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan angka yang mencerminkan pemerataan akses pendidikan dasar dan lanjutan formal atau derajat dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut.

Angka ini dihitung menurut jenjang pendidikan mulai jenjang pendidikan SD/Sederajat, SMP/Sederajat sampai jenjang pendidikan sekolah menengah. APK adalah jumlah murid/siswa pada jenjang pendidikan yang diduduki tanpa melihat umur murid/siswa dibagi dengan jumlah penduduk sesuai dengan kelompok umur pada jenjang pendidikan tersebut dikali dengan seratus persen. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

APK menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Luwu Timur memperlihatkan tendensi yang makin menurun dengan semakin tingginya jenjang pendidikan yang diduduki. APK Murid SD/Sederajat melebihi dari angka seratus persen, hal ini menunjukkan bahwa masih ada penduduk yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/Sederajat yang berumur di bawah 7 tahun dan atau di atas 12 tahun.

Grafik 3.7
Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan di
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012-2014



Sumber : Susenas 2012-2014

Peningkatan terjadi pada APK SLTP/ sederajat, APK SLTA/ sederajat dan APK PT/ sederajat, sedangkan APK SD/ sederajat mengalami penurunan. Pada tahun 2014, APK SD/ Sederajat sebesar 109.35 persen, menunjukkan bahwa besarnya murid yang duduk dibangku sekolah SD/ Sederajat tanpa melihat umur murid tersebut melebihi dari jumlah penduduk usia 7-12 tahun (usia sekolah SD/ Sederajat). Program sekolah gratis yang sudah berjalan sekitar lima tahun ini berhasil mendongkrak APK pendidikan di Kabupaten Luwu Timur khususnya untuk siswa yang berasal dari keluarga miskin pada jenjang pendidikan SD/ sederajat.

Peningkatan APK pada tingkat SLTP/ sederajat, SLTA/ sederajat dan PT/ sederajat ini mengindikasikan bahwa program wajib belajar 12 tahun dari pemerintah sudah disambut baik oleh masyarakat Luwu Timur. Hal ini juga mengindikasikan bahwa program sekolah gratis yang

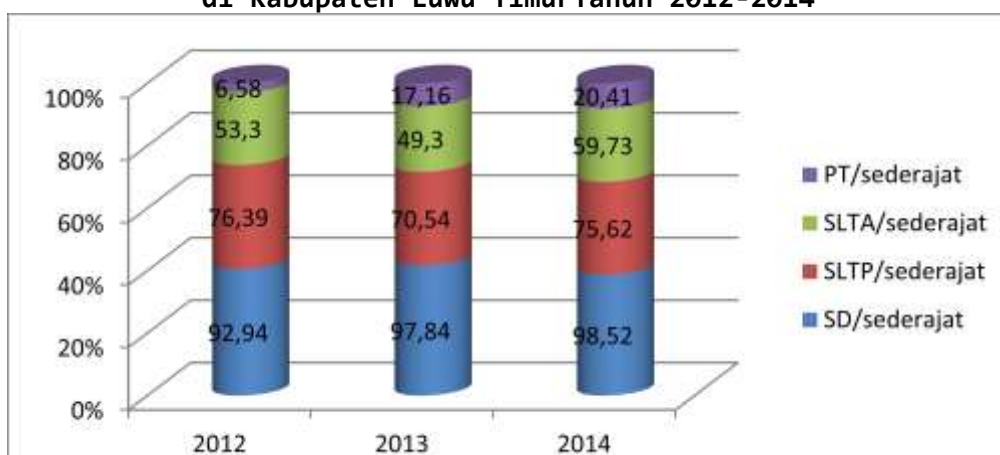
digelontorkan pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara umum dapat dikatakan berhasil.

3.4.7. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan angka yang mencerminkan pemerataan akses pendidikan dasar dan lanjutan formal atau derajat yang sesuai dengan kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Tetapi, jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Kelemahan APM adalah kemungkinan adanya kekurangan estimasi karena siswa diluar kelompok usia yang standar di tingkat pendidikan tertentu.

APM dihitung menurut jenjang pendidikan mulai jenjang pendidikan SD/ sederajat, jenjang pendidikan SMP/ sederajat sampai jenjang pendidikan SMA/ sederajat. APM di suatu jenjang pendidikan didapat dengan membagi jumlah siswa atau penduduk usia sekolah yang sedang bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan

Grafik 3.8.
Angka Partisipasi Murni Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012-2014



dengan jenjang sekolah tersebut dikali seratus persen.

Kalau dilihat menurut jenjang pendidikan, bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, APM-nya semakin menurun. Pada tahun 2014, terjadi

peningkatan APM pada jenjang pendidikan SD/ sederajat, yaitu dari 97,84 persen menjadi 98,52 persen. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya penduduk yang duduk di bangku sekolah SD/ sederajat yang berumur 7-12 tahun lebih rendah dibanding dengan jumlah penduduk berumur 7-12 tahun. Ini juga berarti bahwa penduduk yang berumur 7-12 tahun masih ada yang belum/tidak terserap di bangku SD/ Sederajat sebesar 1,08 persen. Begitu pula APM SLTP/ sederajat, SLTA/ sederajat, dan PT/ sederajat menunjukkan peningkatan yang signifikan.

3.5. Pertumbuhan Ekonomi

3.5.1 PDRB Per Kapita

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi adalah PDRB perkapita. Indikator ini merupakan gambaran nilai tambah yang dapat diciptakan oleh setiap penduduk sebagai akibat dari adanya aktivitas produksi. Meskipun indikator ini belum bisa menggambarkan pendapatan perkapita penduduk suatu wilayah, namun kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonominya dapat diukur dengan tingkat pendapatan riil masyarakat perkapita. PDRB perkapita dihasilkan dari PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun daerah tersebut. Bila pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk, maka PDRB perkapita akan naik, namun sebaliknya bila pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi, maka PDRB perkapita akan turun.

Tabel 3.7.
PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2014^{)}**

Tahun	PDRB Perkapita (Dalam Rupiah)	
	Berlaku	Konstan
(1)	(2)	(3)
2 0 1 0	48.538.668,18	48.538.668,38
2 0 1 1	55.281.457,49	45.265.987,54
2 0 1 2	59.472.230,45	46.604.218,56
2 0 1 3 ^{*)}	63.203.026,22	48.353.630,63
2 0 1 4 ^{**)}	75.587.294,18	51.203.153,62

^{*)} Angka sementara

^{**)} Angka sangat sementara

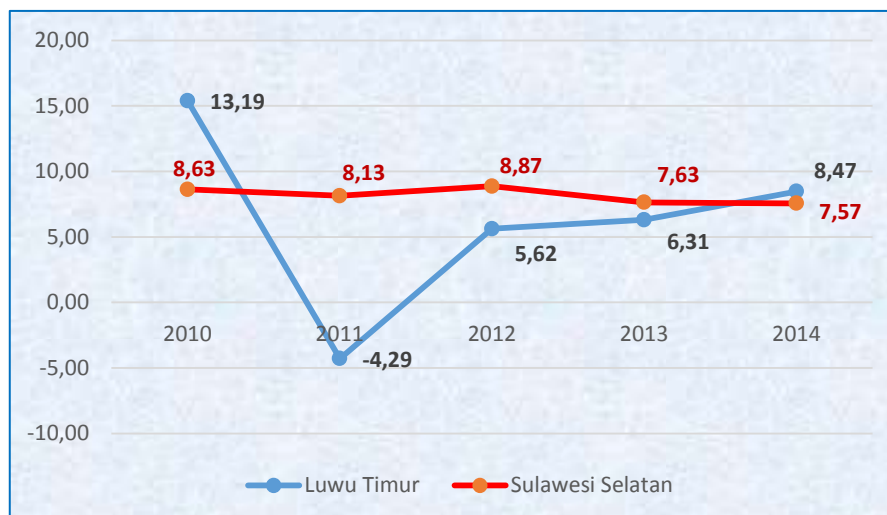
Dampak dari adanya pertambangan nikel di desa Sorowako, Kecamatan Nuha, PDRB perkapita Kabupaten Luwu Timur menjadi sangat tinggi dan paling tinggi di antara kabupaten-kabupaten lain yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini perlu dipahami sangat hati-hati karena angka perkapita tersebut belum tentu dapat dinikmati oleh penduduk secara riil. Artinya pendapatan tersebut "nisbi" disebabkan oleh tidak semua penduduk terlibat secara langsung dalam proses produksi pertambangan.

Seperti halnya nilai PDRB adhb, angka perkapita juga terus meningkat. Dari 48,53 juta pada tahun 2010 hingga mencapai 75,59 juta pada tahun 2014. Sementara atas dasar harga konstan, terjadi satu kali penurunan nilai pada tahun 2011 dan tidak terjadi lagi pada tiga tahun berikutnya.

3.5.2 Pertumbuhan Ekonomi

Selama kurun waktu 2010-2014, perbedaan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan dengan Luwu Timur cukup signifikan dan kadang berlawanan arah. Pertumbuhan ekonomi Luwu Timur sangat dipengaruhi pertumbuhan kategori *Pertambangan dan Penggalan*, karena kontribusi sub kategori ini cukup dominan terhadap pembentukan PDRB Luwu Timur. Berbeda dengan Provinsi Sulawesi Selatan, sub kategori tersebut hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan kategori *Pertambangan dan Penggalan* saja.

Grafik 3.9.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur dan Provinsi Sulawesi Selatan, 2010-2014^{}) (persen)**



Seperti nampak pada Grafik 3.9, bahwa pada tahun 2010, ketika pertumbuhan nikel meningkat sangat signifikan, Luwu Timur mencapai pertumbuhan 13,19 persen, meninggalkan Sulawesi Selatan dengan pertumbuhannya 8,63 persen. Namun pada tahun 2011 saat pertambangan nikel mengalami penurunan produksi, berdampak cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi Luwu Timur hingga mencapai negatif 4,29 persen. Di sisi lain Sulawesi Selatan tetap tumbuh hingga mencapai 8,13 persen.

Pada tahun 2012 ketika produktivitas pertambangan nikel membaik, pertumbuhan Luwu Timur terangkat dari bawah nol menjadi 5,62 persen. Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pun terkena imbasnya, meskipun peningkatannya tidak sebesar Luwu Timur karena pengaruh dari kategori lain yang lebih dominan.

Kondisi yang berbeda terjadi pada tahun 2013 dan 2014. Pertumbuhan ekonomi di Luwu Timur meningkat, bahkan pada tahun 2014 melampaui Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara pertumbuhan provinsi justru melambat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir semua kategori di Luwu Timur melaju lebih cepat melampaui pertumbuhan rata-rata provinsi.

4.2. PDRB Menurut Kategori/Lapangan Usaha

Untuk dapat mengetahui seberapa besar peranan masing-masing kategori/ lapangan usaha di Kabupaten Luwu Timur terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada kategori/lapangan usaha yang bersangkutan, dengan melakukan perbandingan diantara keduanya. Dari sini pula dapat diketahui kategori potensi (unggulan) yang dimiliki oleh Kabupaten Luwu Timur yang dapat diberikan secara maksimal terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada tabel 3.8. nampak bahwa Kategori *Pertambangan dan Penggalan* mampu memberikan share yang sangat besar terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Atas dasar harga berlaku kontribusi yang diberikan kategori ini mencapai 60,09 persen dan atas dasar harga konstan 2010 sharenya mencapai 57,31 persen.

Kategori pemberi kontribusi terbesar kedua terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan adalah kategori *Pertanian, Kehutanan dan Perikanan*. Kontribusi yang diberikan oleh kategori ini pada tahun 2014 atas dasar harga berlaku mencapai 4,64 persen dan atas dasar harga konstan 2010 kontribusinya mencapai 4,59 persen. Urutan berikutnya adalah kategori *Konstruksi*, dengan kontribusi 3,34 persen adhb dan 3,5 persen adhk.

Tabel 3.8.
Perbandingan PDRB Menurut Kategori/Lapangan Usaha
Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014^{*)}

^{*)} Angka sementara

Kategori	Luwu Timur (trilyun Rp)		Sulawesi Selatan (triyun Rp)		% Thd Sul- Sel	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan	Berla ku	Konsta n
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,176	2,343	68,437	51,084	4,64	4,59
B. Pertambangan dan Penggalian	13,525	8,452	22,508	14,748	60,09	57,31
C. Industri Pengolahan	0,466	0,357	41,279	33,433	1,13	1,07
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,006	0,007	0,193	0,221	3,10	3,09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,001	0,001	0,355	0,302	0,27	0,29
F. Konstruksi	1,200	0,966	35,963	27,628	3,34	3,50
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,475	0,433	37,624	32,363	1,26	1,34
H. Transportasi dan Pergudangan	0,098	0,077	13,345	8,641	0,73	0,89
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,027	0,019	4,106	3,183	0,66	0,59
J. Informasi dan Komunikasi	0,188	0,182	14,594	14,560	1,29	1,25
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,107	0,109	10,877	8,106	0,98	1,34
L. Real Estate	0,315	0,213	11,523	8,565	2,73	2,49
M,N. Jasa Perusahaan	0,007	0,005	1,297	1,001	0,53	0,53
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,311	0,246	13,294	10,399	2,34	2,36
P. Jasa Pendidikan	0,284	0,227	15,498	12,473	1,83	1,82
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,162	0,146	5,509	4,433	2,94	3,30
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,015	0,012	3,722	2,943	0,41	0,40
PDRB	20,364	13,794	300,124	234,084	6,79	5,89

^{**)} Angka sangat sementara

B A B 4

**KEMAJUAN PENCAPAIAN
PEMBANGUNAN MANUSIA**

4.1 Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia

Model pembangunan manusia telah menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan yang berarti bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah dari rakyat (*of people*), untuk rakyat (*for people*), dan oleh rakyat (*by people*). Pembangunan dari rakyat mengandung makna pemberdayaan yaitu peningkatan kapabilitas melalui pendidikan, pelatihan, pemeliharaan kesehatan yang lebih baik, perumahan layak huni dan perbaikan gizi. Pembangunan untuk rakyat berarti hasil pembangunan benar-benar diterima semua rakyat secara adil, hasil pertumbuhan ekonomi harus terlihat pada kehidupan rakyat sehari-hari, tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat. Proses ini biasanya tidak secara otomatis tampak, akan tetapi memerlukan waktu serta manajemen kebijakan yang hati-hati. Pembangunan oleh rakyat berarti rakyat harus benar-benar ikut mengambil bagian dan berperan aktif dalam pembangunan, bukan sebagai penonton dan penerima hasil pembangunan. Dengan berperan aktif berarti ikut serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kehidupannya.

Dua hal yang ditekankan pada konsep pembangunan manusia yaitu; (1) peningkatan kapabilitas atau pemberdayaan dan (2) penciptaan peluang. Antara kapabilitas dan peluang harusimbang. Bila kapabilitas berhasil ditingkatkan melalui pembangunan SDM, namun tidak ada peluang atau sebaliknya bila peluang telah tercipta tapi tidak ditopang oleh kemampuan SDM maka akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik.

IPM dapat digunakan sebagai ukuran kebijakan dan upaya yang dilakukan dalam kerangka pembangunan manusia khususnya upaya pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan partisipasi dalam pembangunan. Namun indeks ini hanya akan memberikan gambaran perbandingan antar waktu dan perbandingan antar wilayah. Sebelum pembahasan mengenai perbandingan IPM antar waktu, perlu diuraikan terlebih dahulu mengenai keadaan dari masing-masing indikator (komponen) pembentuk IPM diantaranya yaitu capaian umur panjang dan sehat yang mewakili bidang kesehatan; Harapan Lama Sekolah, partisipasi sekolah dan rata-rata lamanya sekolah mengukur

kinerja pembangunan bidang pendidikan; dan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita.

Indeks tersebut merupakan indeks dasar yang tersusun dari dimensi berikut ini :

- Umur panjang dan kehidupan yang sehat dengan indikator angka harapan hidup;
- Pengetahuan yang diukur dengan Harapan Lama Sekolah dan kombinasi dari angka partisipasi sekolah untuk tingkat dasar, menengah dan tinggi;
- Standar hidup layak dengan indikator PDRB per kapita dalam bentuk *Purchasing Power Parity* (PPP)

Tabel 4.1.
Komponen-Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Metode Baru
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 - 2014

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Angka Harapan Hidup (e_0)	69,26	69,32	69,38	69,42	69,44
2.	Harapan Lama Sekolah (EYS)	11,32	11,54	11,75	11,79	11,95
3.	Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	7,49	7,61	7,70	7,78	7,80
4.	Paritas Daya Beli (PPP) (ribu Rp/Kapita)	11.754	11.813	11.828	11.844	11.859
5.	Indeks Kesehatan	75,78	75,87	75,96	76,03	76,06
6.	Indeks Harapan Lama Sekolah (EYS)	62,89	64,09	65,29	65,51	66,41
7.	Indeks Rata-Rata Lama Sekolah (MYS)	50,71	51,30	51,89	52,02	50,71
8.	Indeks Pendidikan	56,43	57,40	58,30	58,70	59,21
9.	Indeks Pengeluaran (PPP)	75,07	75,23	75,27	75,31	75,35
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		68,47	68,94	69,34	69,53	69,75

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Timur

a. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan diwakili dengan Angka Harapan Hidup (e_0) yang diharapkan dapat mencerminkan pembangunan manusia dibidang kesehatan.

Pada tahun 2014 kenaikan indeks kesehatan Kabupaten Luwu Timur tidak terlalu signifikan dibanding tahun sebelumnya hanya 0,03 poin.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa indeks kesehatan diwakili oleh Angka Harapan Hidup (AHH). Di Kabupaten Luwu Timur tahun 2014 AHH tersebut hampir sama dengan AHH Propinsi Sulawesi Selatan yaitu sekitar 69,60 tahun. Penghitungan indeks kesehatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Indeks } (e_o) \text{ 2014} &= [(69,44 - 20) / (85 - 20)] * 100\% \\ &= 76,06 \% \end{aligned}$$

dimana : 69,44 adalah AHH Kabupaten Luwu Timur 2014.

85 dan 20 adalah angka batasan maksimum dan minimum indeks harapan hidup yang digunakan UNDP.

Jika dibandingkan dengan kab/kota se-Luwu, AHH Kabupaten Luwu Timur berada pada urutan kedua setelah kota Palopo.

Tabel 4.2
Angka Harapan Hidup Kab/Kota se-Luwu tahun 2010-2014

Kabupaten/ Kota (1)	2010 (2)	2011 (3)	2012 (4)	2013 (5)	2014 (6)
Luwu	69,05	69,08	69,11	69,13	69,14
Palopo	69,94	70,00	70,05	70,10	70,12
Luwu Timur	69,26	69,32	69,38	69,42	69,44
Luwu Utara	66,86	66,91	66,95	66,98	67,00
Sulawesi Selatan	68,93	69,12	69,31	69,50	69,60

Sumber:IPM, Prov Sulawesi Selatan

b. Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan gabungan dari dua indikator pendidikan yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Kedua indikator ini dapat dimaknai sebagai ukuran kualitas sumber daya manusia. Harapan lama sekolah menggambarkan persentase harapan penduduk umur 7 tahun ke atas) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sementara indikator rata- rata lama sekolah menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang dijalani oleh penduduk 25 tahun ke atas

untuk menempuh semua jenis pendidikan formal.

Indeks pendidikan di Kabupaten Luwu Timur tahun 2014 sebesar 59,21 persen, meningkat jika dibandingkan tahun 2012 sekitar 58,70. Peningkatan ini disebabkan karena komponen harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah tahun 2014 menunjukkan adanya peningkatan dengan kecepatan yang melambat.

Penghitungan indeks pendidikan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

$$\begin{aligned} 1. \text{ Indeks (EYS) 2014} &= [(11,95 - 0) / (18 - 0)] * 100\% \\ &= 66,41\% \end{aligned}$$

dimana : 11,95 adalah Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur 2014.

18 dan 0 adalah angka batasan maksimum dan minimum indeks harapan hidup yang digunakan UNDP.

$$\begin{aligned} 2. \text{ Indeks (MYS) 2014} &= [(7,8 - 0) / (15 - 0)] * 100\% \\ &= 52,02\% \end{aligned}$$

dimana : 7,80 adalah rata-rata lama sekolah Kabupaten Luwu Timur 2014

15 dan 0 adalah angka batasan maksimum dan minimum indeks rata-rata lama sekolah yang digunakan UNDP.

$$\begin{aligned} 3. \text{ Indeks Pendidikan 2014} &= \frac{[(\text{Indeks EYS} + \text{Indeks MYS})]}{2} \\ &= \frac{(66,41\% + 52,02\%)}{2} \\ &= 59,21\% \end{aligned}$$

Pada tahun 2014, EYS Kabupaten Luwu Timur sebesar 11,95 persen, meningkat dari tahun 2013 sekitar 11,79 persen.

Jika dibandingkan dengan kab/kota se-Luwu, Harapan Lama Sekolah Kabupaten Luwu Timur menempati urutan terbawah. Begitu juga jika dibandingkan dengan Sulawesi Selatan.

Tabel 4.3
Harapan Lama Sekolah Kab/Kota se-Luwu Tahun 2010-2014

Kabupaten/ Kota (1)	2010 (2)	2011 (3)	2012 (4)	2013 (5)	2014 (6)
Palopo	13,03	13,84	14,16	14,49	15,01
Luwu Timur	11,32	11,54	11,75	11,79	11,95
Luwu Utara	11,37	11,60	11,84	11,91	12,09
Luwu	10,71	11,15	11,67	12,33	12,87
Sulawesi Selatan	11,47	11,82	12,16	12,52	12,90

Sumber:IPM, Prov Sulawesi Selatan

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Luwu Timur tahun 2014 sebesar 7,8 tahun meningkat hanya sebesar 0,02 poin. Angka ini relatif tidak mengalami perubahan yang signifikan. Dengan melihat angka 7,8 tahun berarti penduduk Kabupaten Luwu Timur dapat menamatkan pendidikan rata-rata pada tingkat SLTP kelas 2 masih sama dengan tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mudah bagi pemerintah untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk. Komitmen pemerintah dan kesadaran masyarakat akan pentingnya bersekolah perlu terus digalakkan dan disosialisasikan agar dalam jangka panjang terwujud SDM yang berkualitas.

Tabel 4.4
Rata-rata Lama Sekolah Kab/Kota se-Luwu Tahun 2010-2014

Kabupaten/ Kota (1)	2010 (2)	2011 (3)	2012 (4)	2013 (5)	2014 (6)
Palopo	9,77	9,83	9,89	9,95	9,96
Luwu Timur	7,49	7,61	7,70	7,78	7,80
Luwu	7,07	7,18	7,21	7,36	7,60
Luwu Utara	6,48	6,78	6,81	7,02	7,19
Sulawesi Selatan	7,29	7,33	7,37	7,45	7,49

Sumber:IPM, Prov Sulawesi Selatan

Indeks pendidikan Kabupaten Luwu Timur di tahun 2014 dengan angka 59,21 tersebut ternyata menempatkan Kabupaten Luwu Timur berada di posisi ketiga setelah Kabupaten Luwu. Dengan melihat kondisi ini, tampaknya sektor pendidikan di daerah ini sudah cukup berkembang dengan baik. Namun demikian masih diperlukan suatu upaya terencana dan berkesinambungan agar pembangunan pendidikan di Kabupaten Luwu Timur dapat menuntaskan permasalahan pendidikan sekaligus mengejar target program penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.

c. Indeks Paritas Daya Beli

Komponen PPP (*Purchasing Power Parity*) atau dikenal sebagai komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak, yang dihitung dari nilai konsumsi riil perkapita. Daya beli merupakan kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya untuk barang dan jasa. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh harga-harga riil antar wilayah, karena nilai tukar yang digunakan dapat menurunkan atau menaikkan kemampuan daya beli.

Kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Luwu Timur terus meningkat. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Luwu, kemampuan daya beli penduduk Kabupaten Luwu Timur menempati posisi paling atas yaitu sebesar Rp 11.859 ribu rupiah per kapita per tahun. Kenaikan dalam kemampuan daya beli ini yang akhirnya pada tahun 2014 indeks pengeluaran per kapita Kabupaten Luwu Timur mencapai sebesar 75,35 persen.

Tabel 4.5.
Kemampuan Daya Beli Kab/Kota se-Luwu Tahun 2010-2014
(Ribu Rupiah/kapita/Tahun)

Kabupaten/ Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Luwu Utara	10.250	10.375	10.471	10.541	10.605
Palopo	11.252	11.372	11.493	11.590	11.713
Luwu	8.454	8.560	8.636	8.687	8.764
Luwu Timur	11.754	11.813	11.828	11.844	11.859
Sulawesi Selatan	9.331	9.459	9.560	9.632	9.723

Sumber:IPM, Prov Sulawesi Selatan

Penghitungan indeks paritas daya beli (PPP) dilakukan dengan cara sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Indeks PPP 2014} &= \frac{(\text{LN}(11.859) - \text{LN}(1007.436))}{(\text{LN}(26572,352) - \text{LN}(1007,436))} * 100 \% \\
 &= 75,35 \%
 \end{aligned}$$

dimana 11.859 ribu adalah daya beli Kabupaten Luwu Timur tahun 2014 26572,352 ribu dan 107,436 ribu adalah angka batasan maksimum dan minimum indeks paritas daya beli yang digunakan UNDP. Pencapaian indeks PPP sekitar 75,35 persen, berarti bahwa daya beli masyarakat Luwu Timur rata-rata sebesar Rp 11.859,- setahun perkapita, baru

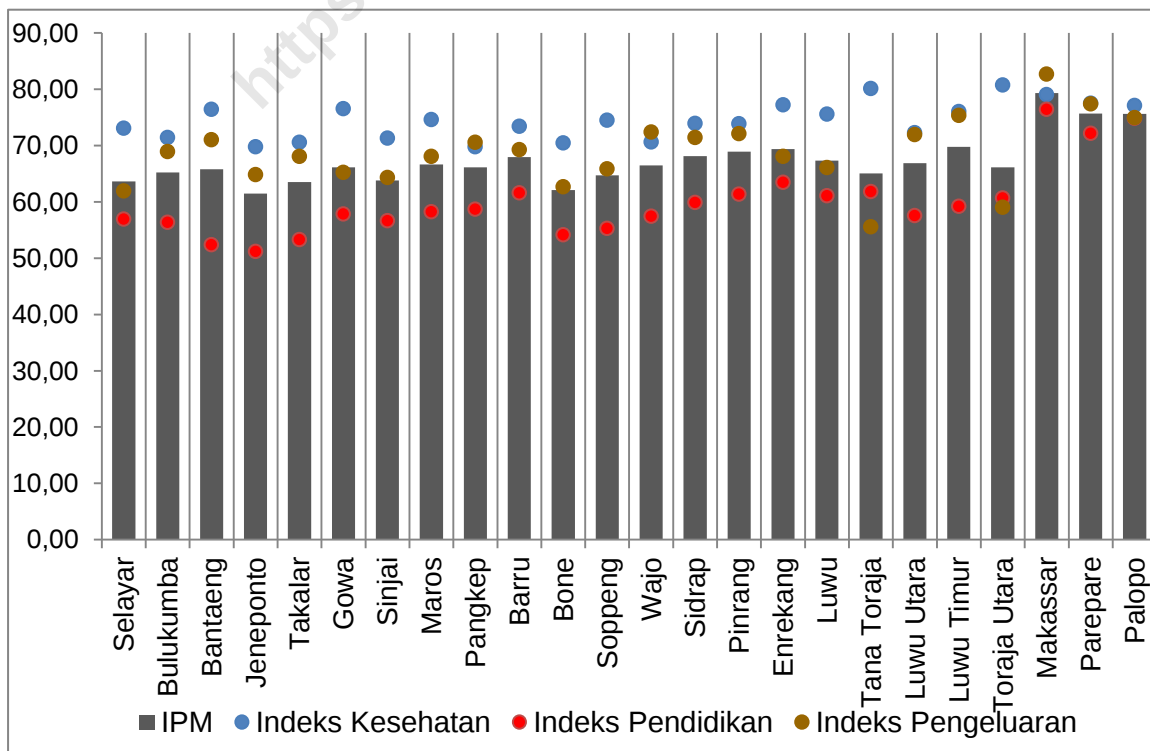
mencapai 75,35 persen kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka dibutuhkan 24,65 persen sisanya untuk mencapai kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan standar hidup layak.

4.2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur (Perbandingan antar Wilayah di Propinsi Sulawesi Selatan)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur, Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional memperlihatkan perkembangan yang positif selama kurun waktu tahun 2007-2014. Perkembangan IPM Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2007-2014 sedikit melambat bila dibandingkan dengan IPM Propinsi Sulawesi Selatan maupun IPM Nasional.

Perkembangan angka IPM selama periode 2010-2014 dapat terjadi karena adanya perubahan satu atau lebih komponen IPM dalam periode tersebut. Perubahan yang dimaksud dapat berupa peningkatan atau penurunan besaran persen /rate dari komponen IPM angka harapan hidup, Harapan Lama Sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita.

Grafik 4.1.
IPM Kabupaten/Kota sePropinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2014



Selama periode 2010-2014 baik IPM Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan maupun Nasional menunjukkan peningkatan. Hal ini tidak terlepas dari kinerja pemerintah yang terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini tercermin dari peningkatan komponen IPM seperti indikator harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran riil per kapita.

Perbandingan antar indikator (komponen IPM seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya) merupakan tinjauan parsial, artinya tingkat keberhasilan pembangunan baru diukur dari satu komponen saja. Akan tetapi dengan adanya indikator tunggal IPM merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan (*output* pembangunan) yang dicapai oleh suatu daerah. Makin tinggi nilai IPM suatu daerah, maka makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut. Namun demikian, untuk menilai keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah tidak mutlak dilihat dari urutan posisi (*ranking*), akan tetapi dapat juga dilihat berdasarkan besaran nilai reduksi *shortfall*. Berdasarkan ukuran itu terlihat seberapa besar akselerasi capaian pembangunan manusia dalam satu tahun.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2014 mencapai 69,75 meningkat 0,22 poin dibanding tahun sebelumnya. Dengan pencapaian ini maka Kabupaten Luwu Timur untuk tahun 2014 berada pada peringkat ke-4 dari 24 kabupaten/kota se Sulawesi Selatan. Posisi pertama masih sama dengan tahun sebelumnya adalah Kota Makassar (79,35) dan posisi terakhir adalah Kabupaten Jeneponto (61,45). Sementara kabupaten/kota lain mengalami pergeseran yang bervariasi.

Kenaikan IPM di Kabupaten Luwu Timur tahun 2014 ditunjang oleh meningkatnya semua komponen penyusun IPM. Selanjutnya posisi IPM Kabupaten Luwu Timur jika dibandingkan dengan kabupaten/kota se-Luwu dengan menggunakan penghitungan metode baru, maka IPM Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2014 berada pada posisi kedua setelah Kota Palopo. Namun demikian pertumbuhannya dari tahun ke tahun cukup melambat.

Terbukti dari tahun 2010 ke tahun 2011 hanya meningkat 0,68 poin; tahun 2011 ke 2012 naik 0,57 poin; tahun 2012 ke 2013 naik 0,27 poin; dan tahun 2013 ke 2014 naik 0,32 poin.

Jika dilihat pada masing-masing komponen penyusun IPM, perbedaan mendasar yang menyebabkan IPM Kabupaten Luwu Timur lebih rendah dari kabupaten yang lain adalah pada komponen Angka Harapan Hidup dan pengeluaran per kapita (PPP). Dimana kedua komponen tersebut berada pada urutan paling bawah jika dibandingkan dengan ketiga Kabupaten yang lain. Sedangkan untuk komponen Harapan Lama Sekolah dan rata-rata lama sekolah Kabupaten Luwu Timur berada pada urutan kedua setelah Kota Palopo. Hal ini mengindikasikan bahwa program pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam bidang pendidikan telah berpengaruh pada peningkatan kualitas mutu pendidikan. Namun untuk program kesehatan masih perlu peningkatan kembali. Begitu juga dengan pengeluaran per kapita penduduk, diharapkan terjadi peningkatan daya beli masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan kriteria UNDP, ternyata semua kabupaten/kota yang ada di Sulawesi Selatan tergolong tingkat pembangunan manusia menengah (IPM-nya pada kisaran 50 sampai 79). Akan tetapi untuk keperluan perbandingan antar kabupaten/kota tingkatan status menengah dimodifikasi dengan memecah klasifikasi menengah menjadi dua, yaitu menengah bawah ($50 \leq \text{IPM} < 66$) dan menengah atas ($66 \leq \text{IPM} < 80$). Dengan demikian hampir semua IPM Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan berada pada pembangunan manusia menengah atas.

Hal lain yang perlu diungkapkan dari perkembangan IPM adalah terdapat beberapa Kab/kota yang mengalami kemajuan cukup pesat selama 2012-2014. Kemajuan ini terlihat dari angka reduksi *shortfall* yang telah dicapai oleh kabupaten/kota yang mengalami kemajuan. Jadi, sebenarnya yang membuat tingginya capaian *shortfall* terletak pada selisih antara IPM tahun sebelumnya dan IPM yang dicapai.

Reduksi *shortfall* Kabupaten Luwu Timur selama kurun waktu 2012-2014 menunjukkan angka 1,53 persen. Hal ini berarti bahwa angka IPM Kabupaten Luwu Timur mengalami sedikit kemunduran jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan reduksi shortfall tahun 2011-2012 sebesar 1,65 persen. Kalau dibandingkan dengan Kabupaten/kota lain se-Luwu pada periode 2012-2014, maka Kabupaten Luwu Timur memiliki reduksi *shortfall* terendah. Sedangkan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Propinsi Sulawesi Selatan, maka Kabupaten Luwu Timur memiliki reduksi *shortfall* terendah kedua setelah Kabupaten Enrekang.

Tabel 4.6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Luwu Timur Perbandingan antar Wilayah di Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010-2014

No.	Kabupaten/Kota	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Selayar	62,15	62,53	62,87	63,16	63,66
2	Bulukumba	62,73	63,36	63,82	64,27	65,24
3	Bantaeng	62,46	63,07	63,99	64,88	65,77
4	Jeneponto	58,31	58,95	59,62	60,55	61,45
5	Takalar	60,23	60,83	61,66	62,58	63,53
6	Gowa	63,83	64,42	64,65	65,45	66,12
7	Sinjai	61,31	62,13	62,74	63,47	63,83
8	Maros	64,07	64,95	65,50	66,06	66,65
9	Pangkep	62,79	63,60	64,30	65,24	66,16
10	Barrau	64,94	65,73	66,07	67,02	67,94
11	Bone	59,69	60,21	60,77	61,40	62,09
12	Soppeng	63,51	63,80	64,05	64,43	64,74
13	Wajo	63,07	64,00	64,88	65,79	66,49
14	Sidrap	65,54	65,88	66,19	67,15	68,14
15	Pinrang	66,25	66,96	67,64	68,14	68,92
16	Enrekang	66,27	67,03	67,74	68,39	69,37
17	Luwu	63,95	64,71	65,43	66,39	67,34
18	Tana Toraja	62,83	63,22	63,96	64,55	65,08
19	Luwu Utara	64,77	65,57	65,99	66,40	66,90
20	Luwu Timur	68,47	68,94	69,34	69,53	69,75
21	Toraja Utara	63,51	64,48	64,89	65,65	66,15
22	Makassar	77,63	77,82	78,47	78,98	79,35
23	Parepare	73,55	74,20	74,67	75,10	75,66
24	Palopo	73,03	74,02	74,54	75,02	75,65
SULAWESI SELATAN		66,00	66,65	67,26	67,92	68,49

Sumber: Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

L A M P I R A N

ANALISIS INDEKS PEMBANGUNAN
MANUSIA KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2014

<https://luwutimurkab.go.id>

Tabel Lampiran 1.
Beberapa Indikator Kependudukan dan Geografis di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2014

No	Indikator	2010*	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(8)
1.	Jumlah Kecamatan	11	11	11	11	11
2.	Jumlah Desa&Kelurahan	112	112	127	128	128
3.	Luas Wilayah	6.944,88 km ²				
4.	Jumlah Penduduk** (jiwa)	243.069*	245.515	250.608	263.012	269.405
5.	Penduduk Menurut Kelompok Umur (%)**					
	a. 0-14 Tahun	82.359	83.759	85.059	86.255	87.479
	b. 15-64 Tahun	152.365	156.997	161.773	166.476	171.212
	c. 65 Tahun ke Atas	9.085	9.467	9.867	10.281	10.714
6.	Angka Beban Tanggungan	61,27	62,22	61,71	57,99	57,35
7.	Jumlah Rumah Tangga	56.178	56.157	61.080	61.509	62.264
8.	Sex Ratio	106,14	105,77	105,90	105,81	105,77
9.	Laju Pertumbuhan Penduduk (persen)*	3,406	2,63	2,43	2,60	

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur

Keterangan : *) Hasil SP 2010

**) Data yang digunakan adalah Hasil Estimasi DAU

Tabel Lampiran 2a.
Beberapa Indikator Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2014

No.	Indikator	2010	2010	2011	2012	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Rumah Sakit	2	2	2	2	2
2.	Puskesmas	15	15	15	15	15
3.	Rasio Penduduk- Puskesmas	16.204	16.368	16.707	17.534	17.960
4.	Puskesmas Pembantu	59	60	60	60	60
5.	Dokter	64	65	64	64	76
6.	Rasio Penduduk Dokter	3.798	3.777	3.915	4.109	3.544
7.	Perawat	250	296	294	289	303
8.	Bidan	182	187	184	189	198
9.	Posyandu	248	255	260	264	265
10.	Praktek dokter/bidan	96	76	99	126	118

Sumber : Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka 2010-2014

Tabel Lampiran 2b.
Beberapa Indikator Kesehatan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2014

No.	Indikator	2010	2010	2011	2012	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Angka Harapan Hidup (e_0)	69,26	69,32	69,38	69,42	69,44
2.	% Keluhan Kesehatan Penduduk	34,92	32,52	34,27	31,66	26,12
3.	% Penduduk yang sakit (mordibitas)	20,59	20,37	22,50	20,97	
4.	% Lama Hari Sakit					
	• < 4 hari	55,13	65,44	54,12	54,87	61,07
	• 4-7 hari	31,26	25,47	32,79	28,44	24,03
	• 8-14 hari	4,63	2,75	6,37	5,00	4,73
	• 15-21 hari	3,59	0,96	0,27	2,46	1,82
	• 22-30 hari	5,39	5,38	6,44	9,23	8,35
5.	% Penolong Persalinan terhadap Balita					
	• Tenaga Medis	75,40	75,85	79,16	78,62	77,59
	• Tenaga Non Medis	24,60	24,15	20,84	21,38	22,41
6.	% Pemberian Imunisasi terhadap Balita					
	• BCG	92,68	93,64	100,00	98,15	94,55
	• DPT	91,00	90,79	95,53	94,48	92,87
	• Polio	93,67	88,93	95,02	94,02	92,60
	• Campak/Morbili	79,72	76,69	79,63	82,64	80,85
	• Hepatitis B	88,02	85,47	94,93	93,49	90,78

Sumber : Susenas 2010-2014

Tabel Lampiran 2c. Beberapa Indikator Kesehatan dan Sarana Perumahan dan Lingkungan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2014

No	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Lantai Rumah					
	• Luas lantai (m ²):					
	<20	4,86	2,73	3,24	4,33	2,10
	20-49	31,85	32,19	29,01	31,41	33,59
	50-99	48,89	48,27	49,94	42,53	42,50
	100-149	9,54	11,58	11,72	14,88	14,88
	150+	4,85	5,24	6,09	6,84	6,93
	• Lantai tanah (%)	7,96	7,73	6,25	6,16	6,22
	• Lantai bukan tanah (%)	92,04	92,27	93,75	93,84	93,78
2.	Sumber Air Minum Rumahtangga (%)					
	• Air Bersih	68,78	76,08	77,23	77,96	81,50
	• Bukan Air Bersih	31,22	23,92	22,77	22,04	18,50
3.	Penggunaan Kakus Rumahtangga (%)					
	• Menggunakan Kakus	78,62	76,20	79,91	82,91	83,03
	• Tidak Menggunakan Kakus	21,38	23,80	20,09	17,09	16,97
4.	Penggunaan tempat pembuangan akhir tinja (%)					
	• Tangki/SPAL	49,58	60,12	57,69	63,68	67,15
	• Bukan Tangki/SPAL	50,42	39,88	42,31	36,32	32,85

Sumber : Susenas 2010-2014

Tabel Lampiran 3a.
Beberapa Indikator Pendidikan Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2009/2010-2013/2014

No	Indikator	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/ 2012	2012/ 2013	2013/ 2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Jumlah Sekolah :						
	• SD/ sederajat	162	171	171	173	173
	• SLTP/ sederajat	53	59	59	57	57
	• SLTA/ sederajat	29	30	31	31	31
2. Jumlah Murid:						
	• SD/ sederajat	33.18 5	35.905	35.849	35.545	35.090
	• SLTP/ sederajat	14.21 8	14.387	14.915	15.224	16.099
	• SLTA/ sederajat	8.931	10.213	11.258	11.957	12.178
3. Jumlah Guru :						
	• SD/ sederajat	1.289	2.175	2.197	2.216	2.165
	• SLTP/ sederajat	955	1.087	1.158	1.167	1.168
	• SLTA/ sederajat	568	633	852	813	789
4. Rasio Murid-Guru *) :						
	• SD/ sederajat	25,74	16,51	16,32	16,04	15,51
	• SLTP/ sederajat	14,89	13,24	12,88	13,04	13,78
	• SLTA/ sederajat	15,72	16,13	13,21	14,71	15,43
5. Rasio Murid Sekolah *):						
	• SD/ sederajat	204,85	209,97	209,64	205,46	202,83
	• SLTP/ sederajat	268,26	243,85	252,80	267,09	282,44
	• SLTA/ sederajat	307,97	340,43	363,16	385,71	392,84

Sumber : Kabupaten Luwu Timur Dalam Angka
Ket : *) hasil penghitungan.

Tabel Lampiran 3b. Beberapa Indikator Pendidikan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2014

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	% Angka Melek Huruf 15 tahun ke atas	93,24	93,28	93,43	93,87	96,96
2.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,49	7,61	7,70	7,78	7,80
3.	Harapan Lama Sekolah	7,49	7,61	7,70	7,78	7,80
4.	% Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Usia 10 tahun ke atas					
	• Tidak/belum pernah sekolah	5,63	3,93	4,43	4,59	3,11
	• Tidak/belum tamat SD/ sederajat	20,41	22,69	21,06	22,58	22,96
	• SD/ sederajat	29,09	29,60	29,65	26,93	27,23
	• SLTP/ Sederajat	17,02	18,13	18,11	18,83	18,27
	• SMU/ Sederajat	20,44	19,54	19,90	20,09	21,8
	• Perguruan Tinggi	7,41	6,11	6,85	6,98	5,56
4.	Angka Partisipasi Sekolah (APS)					
	• 7 – 12	98,98	98,49	98,36	99,38	99,68
	• 13 – 15	91,65	89,02	91,47	91,90	94,49
	• 16 – 18	64,42	57,58	59,13	53,05	64,77
	• 19 – 24	5,75	7,64	14,81	18,36	24,10
5.	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	• SD/ sederajat	*	100,62	106,80	112,78	109,35
	• SLTP/ Sederajat	*	100,86	91,55	75,84	82,06
	• SMU/ Sederajat	*	73,47	79,12	68,62	76,88
	• Perguruan Tinggi	*	6,67	11,22	20,89	23,2
6.	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	• SD/ sederajat	*	86,37	92,94	97,84	98,52
	• SLTP/ Sederajat	*	69,04	76,39	70,54	75,62
	• SMU/ Sederajat	*	51,82	53,30	49,30	59,73
	• Perguruan Tinggi	*	4,33	6,58	17,16	20,41

Sumber : Susenas 2010-2014

Tabel Lampiran 4a. Perbandingan PDRB Menurut Kategori/Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur dengan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014)**

**) Angka sementara*

Kategori	Luwu Timur (trilyun Rp)		Sulawesi Selatan (trilyun Rp)		% Thd Sul-Sel	
	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan	Berlaku	Konstan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,176	2,343	68,437	51,084	4,64	4,59
B. Pertambangan dan Penggalan	13,525	8,452	22,508	14,748	60,09	57,31
C. Industri Pengolahan	0,466	0,357	41,279	33,433	1,13	1,07
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,006	0,007	0,193	0,221	3,10	3,09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,001	0,001	0,355	0,302	0,27	0,29
F. Konstruksi	1,200	0,966	35,963	27,628	3,34	3,50
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,475	0,433	37,624	32,363	1,26	1,34
H. Transportasi dan Pergudangan	0,098	0,077	13,345	8,641	0,73	0,89
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,027	0,019	4,106	3,183	0,66	0,59
J. Informasi dan Komunikasi	0,188	0,182	14,594	14,560	1,29	1,25
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,107	0,109	10,877	8,106	0,98	1,34
L. Real Estate	0,315	0,213	11,523	8,565	2,73	2,49
M,N. Jasa Perusahaan	0,007	0,005	1,297	1,001	0,53	0,53
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,311	0,246	13,294	10,399	2,34	2,36
P. Jasa Pendidikan	0,284	0,227	15,498	12,473	1,83	1,82
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,162	0,146	5,509	4,433	2,94	3,30
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,015	0,012	3,722	2,943	0,41	0,40
PDRB	20,364	13,794	300,124	234,084	6,79	5,89

***) Angka sangat sementara*

Sumber: PDRB Kabupaten Luwu Timur

*) Data masih sementara

Tabel Lampiran 4b. Beberapa Indikator Perekonomian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010-2014

No.	Indikator	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pengeluaran perkapita sebulan (Rp)					
	• Makanan	243.149	290.372	331.422	339.049	368.997
	• Non Makanan	244.652	382.493	388.407	402.736	452.136
	• Total Pengeluaran	487.801	672.864	719.829	741.784	821.132
2.	Pola Konsumsi Penduduk (%)					
	• Makanan	54,24	43,15	46,04	45,71	44,94
	• Non Makanan	45,76	56,85	53,96	54,29	55,06
3.	Angka Kemiskinan (%)	9,18	8,29	7,72	8,38	**
4.	Bekerja (%)	65,82	63,43	61,85	60,93	61,75
5.	Mencari Kerja (%)	10,03	4,89	5,46	4,08	
6.	Bukan Angkatan Kerja (%)	24,15	31,67	32,68	34,99	32,79
8.	TPAK	75,85	68,33	67,32	65,01	67,21
9.	Tingkat Pengangguran Terbuka					
	• Laki-laki	7,91	6,30	5,36	5,59	6,49
	• Perempuan	20,95	8,90	13,20	7,50	11,04
	• Laki-laki+Perempuan	13,22	7,16	8,12	6,28	8,12

Sumber : Susenas dan Sakernas 2010-2014

** Belum ada datanya

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN LUWU TIMUR
Jl. Soekarno-Hatta, Puncak Indah, Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan
Telp: (0474) 321 647; Email : bps7325@bps.go.id